

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**EVALUASI PROGRAM PENYALURAN KARTU INDONESIA
PINTAR DALAM USAHA MENINGKATKAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN BUKIT
RAYA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**ADINA SAPUTRI
167310103**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Adina Saputri
NPM : 167310103
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : S1 (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Syaprianto S.Sos., M.I.P

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Adina Saputri
NPM : 167310103
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sarjana (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

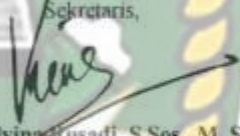
Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Ketua,


Syaprianto S.Sos., M.IP

Sekretaris,


Sylvina Kusadi, S.Sos., M. Si

Anggota,


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA

Mengetahui
Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adina Saputri
NPM : 167310103
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua

Syaprianto S.Sos., M.IP

Sylvina Rusadi, S.Sos., M. Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Allhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat serta karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ini banyak pihak yang dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.M., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Syaprianto, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing atas ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.

6. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
7. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada ayah Syafruddin dan Ibunda tercinta Ernawati, beserta seluruh keluarga besar, atas segala dukungan dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya bagi penulis.
8. Kepada senior-senior di KPB dan para senior dan kader HMI MPO, terutama kepada kak Bella Rantika, bang Febri Romadhon, kak Cessa Viona, bang Dian Aksara, bang Andi Lasmiadi, bang Abbastian, Arifa Adilla, Yanella Farhaini, Alfin Wardemata, Jiwanda Auli Ikhsan, Bayu Saputra, Rifais, Dedy Heryana, Doni Sutardi, Laula Anhadini, Saras Aulora, Fia Astrid, Anwar Bangun Silitonga.
9. Teman-teman seperjuangan IP B angkatan 2016 dan kerabat-kerabat sahabat yang telah banyak memberi support dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan sukses dimasa depan,Amin Ya Robbal'amin.

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, ilmu pengetahuan, serta kasih sayang dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dan Rahmat dari Allah SWT. Demikianlah,semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Penulis,

Ttd

Adina Saputri

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Kegunaan Penelitian	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	21
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	21
2. Konsep Kebijakan.....	24
3. Konsep Kebijakan Publik	25
4. Konsep Evaluasi	29
5. Konsep Program Indonesia Pintar	33

B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pikir	40
D. Konsep Operasional	42
E. Operasional Variabel	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Informan dan Key Informan	46
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
G. Jadwal Waktu Kegiatan	50
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambar Umum Kota Pekanbaru.....	51
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	51
2. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	52
3. Kependudukan	54
4. Pemerintahan	55
a. Orde Baru	55
b. Otonomi Daerah	56
B. Profil Sekolah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	56
1. SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru	56
2. SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru	59
3. SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru	62
4. SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru	64
C. Fungsi dan Tugas Organisasi Sekolah	67
D. Struktur Organisasi Tata Usaha (TU)	74
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya	81

1. Efektifitas Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	82
2. Efisiensi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	87
3. Kecukupan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	89
4. Perataan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	93
5. Responsivitas Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	96
6. Ketepatan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	98
B. Hambatan Penyaluran Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	101
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR KEPUSTAKAAN	105
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

I. 1	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.	8
I. 2	Daftar Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Se-Kota Pekanbaru	10
I. 3	Daftar Sekolah Menengah Pertama Program Indonesia Pintar di Kecamatan Bukit Raya Tahun Anggaran 2017.....	11
I. 4	Daftar Sekolah Menengah Pertama Program Indonesia Pintar di Kecamatan Bukit Raya Tahun Anggaran 2018	12
I. 5	Daftar Sekolah Menengah Pertama Program Indonesia Pintar di Kecamatan Bukit Raya Tahun Anggaran 2019.....	12
I. 6	Rincian Nama dan Alamat Sekolah, Jumlah Siswa, Siswa Penerima KIP, Jumlah Dana KIP PerSemester, Daftar Jumlah SPP Sekolah dan Sekolah Negeri dan Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	14
II. 1	Peneliti terdahulu terkait Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.	38
II. 2	Operasional Variabel Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.	44
III. 1	Daftar Informan dan Key Informan Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	47
III. 2	Jadwal waktu kegiatan penelitian Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	50

IV. 1	Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2019.....	53
IV. 2	Kondisi Siswa Sekolah SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru	57
IV. 3	Sarana dan Prasarana Sekolah Negeri 22 Kota Pekanbaru	58
IV. 4	Kondisi Sarana Olahraga Sekolah SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru.....	58
IV. 5	Kondisi Siswa Sekolah SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru	60
IV. 6	Sarana dan Prasarana Sekolah Negeri 35 Kota Pekanbaru	61
IV. 7	Kondisi Sarana Olahraga Sekolah SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru	61
IV. 8	Kondisi Siswa Sekolah SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru	63
IV. 9	Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta YLPI Kota Pekanbaru	63
IV. 10	Kondisi Sarana Olahraga Sekolah SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru	64
IV.11	Kondisi Siswa Sekolah SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru	66
IV. 12	Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru	66
IV. 13	Kondisi Sarana Olahraga Sekolah SMP Swasta Muhammadiyah Kota Pekanbaru	67



DAFTAR GAMBAR

- I.1 Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)18
- II.1 Kerangka Pikir Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru41



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adina Saputri
NPM : 167310103
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020
Pelaku Pernyataan,


Adina Saputri

**EVALUASI PROGRAM PENYALURAN KARTU INDONESIA PINTAR
DALAM USAHA MENINGKATKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KURANG
MAMPU DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh:

Adina Saputri

167310103

Kata Kunci: Evaluasi, Kartu Indonesia Pintar, Dinas Pendidikan, Sekolah Mengah Pertama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam pemerataan pendidikan pemerintah yang membuat program pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Yang bertujuan agar anak usia 6-12 tahun mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat untuk mengurangi anak yang berhenti sekolah dan untuk membantu siswa yang kurang mampu di sekolah baik yang ditingkat dasar maupun tingkat menengah. Dalam meringankan biaya pendidikan dengan penyalurkan dana langsung kepada siswa melalui bank.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik mengumpulkan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek yang penelitian terdapat satu key informan dan sebelas informan.

Dari hasil penelitian Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dilihat dari 6 indikator menurut William N Dunn yaitu efektifitas dan efensiensi pelaksanaan program ini belum memenuhi target karena masih ada siswa yg seharusnya dapat dia tidak mendapatkan dana bantuan KIP. Indikator Kecukupan dan perataan tidak semua siswa yang mendapatkan KIP sehingga sekolah melalukan beberapa usaha untuk melakukan upaya perataan seperti mengusulkan nama siswa yang kurang mampu ke dapodik, kemudian indikator responsivitas dan ketepatan KIP dirasa sangat membantu bagi siswa yang kurang mampu dan di harapkan kedepannya lebih bagus lagi program yang di buat oleh pemerintah pusat. Saran untuk KIP agar dilakukan sosialisasi kepada siswa sehingga untuk kedepannya pemerataan KIP ini lebih baik.

EVALUATION OF THE SMART INDONESIAN CARD DISTRIBUTION PROGRAM IN THE BUSINESS OF IMPROVING LESS COMMUNITY EDUCATION IN BUKIT RAYA SUB-DISTRICT, PEKANBARU CITY

ABSTRACT

By:

Adina Saputri
167310103

Keywords: Evaluation, Smart Indonesia Card, Education Office, Junior High School.

This study aims to determine the evaluation of the Smart Indonesia Card Distribution Program in an Effort to Improve the Education of the Poor in the Bukit Raya District, Pekanbaru City in the distribution of government education which makes educational programs namely the Smart Indonesia Program (PIP) which is distributed through the Smart Indonesia Card (KIP). Which aims to ensure that children aged 6-12 years get education services until graduation to reduce children dropping out of school and to help underprivileged students at school, both at the primary and secondary levels. In reducing the cost of education by channeling funds directly to students through banks.

The type of research used is descriptive using qualitative methods with data collection techniques done by observation, interview and documentation techniques. As for the research subjects, there is one key informant and eleven informants.

From the results of the research evaluation of the Smart Indonesia Card Distribution Program in an Effort to Improve the Education of the Underprivileged Community in Bukit Raya Subdistrict, Pekanbaru City, seen from 6 indicators according to William N Dunn, namely the effectiveness and efficiency of implementing this program has not met the target because there are still students who should not be able to get it. KIP assistance funds. Adequacy and evenness indicators are not all students who get KIP so that the school makes several efforts to make leveling efforts such as proposing the names of underprivileged students to the dapodik, then indicators of the responsiveness and accuracy of KIP are considered very helpful for students who are less fortunate and it is hoped that in the future it will be even better programs created by the central government. Suggestions for KIP to do socialization to students so that in the future KIP distribution is better.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV diantaranya berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Rumusan tersebut adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilakukan oleh negara yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social.

Pada pasal 18 Undnag-Undang Dasar 1945 dikatakan melalui pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut di bagi atas Kabupaten dan Kota. Untuk menindaklanjuti amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Maka Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi 3 bagian, pertama Urusan Pemerintahan Absolut, kedua Urusan Pemerintahan Konkuren.

Berdasarkan urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintah yang menjadi sepenuhnya kewenangan pusat meliputi:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

Kemudian urusan Pemerintahan Konkuren dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

- a. Dalam pasal 12 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 4. Perumahan rakyat
 5. Ketentraman
 6. Social
- b. Urusan pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi:
 1. Tenaga kerja
 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3. Pangan
 4. Pertanahan
 5. Lingkungan hidup
 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 9. Perhubungan
 10. Komunikasi dan informatika
 11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
 12. Penanaman
 13. Penanaman modal usaha
 14. Kependudukan dan olahraga
 15. Statistik
 16. Persandian
 17. Kebudayaan
 18. Perpustakaan
 19. Kearsipan
- c. Selanjutnya pasal 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang meliputi:
1. Kelautan dan perikanan
 2. Pertanian
 3. Kehutanan
 4. Energi dan sumber daya mineral
 5. Pariwisata
 6. Industry
 7. Perdagangan
 8. Ketransmigrasian

Dari penjelasan dalam pasal 12 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwasanya pendidikan merupakan salah satu urusan pemerinahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3A bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik “orang kaya” mau pun “orang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil).

Menurut Undang – Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan.

Setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Berikut merupakan kriteria miskin menurut standar BPS (Biro Pusat Statistik):

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m^2 per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbiah/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plaster.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam/dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga ialah: petani dengan luas lahan 500m^2 , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000, - perbulan.
13. Pendidikan tinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000, - seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat yang kurang mampu adalah Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tepat pada tanggal 3 November 2014 meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku.

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.

19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut Kartu Indosena Pintar (KIP) adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat Program Indonesia Pintar.

Didalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Progam Indonesia Pintar:

Tabel I. 1: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Progam Indonesia Pintar.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018	
Pasal- pasal	Ayat
Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. 2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 3. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat

	<p>KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penand atau identitas untuk mendapatkan dana PIP.</p> <p>4. Menter adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>5. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap kemajuan Pendidikan formal dan/atau nonformal.</p>
Pasal 2	<p>PIP bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal.</p>
Pasal 3	<p>PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan; b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP; d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan; e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018.

Pekanbaru menjadi salah satu Kota yang melaksanakan Program Indonesia Pintar dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan

sekolah dan menghindari anak-anak yang putus sekolah. Berikut daftar penerima Program Indonesia Pintar di seluruh Kecamatan Kota Pekanbaru:

Tabel I. 2: Daftar Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Se-Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Bukit Raya	734	745	514
2.	Lima Puluh	918	934	740
3.	Marpoyan Damai	742	869	772
4.	Payung Sekaki	580	563	443
5.	Pekanbaru Kota	159	124	55
6.	Rumbai	1.006	1.093	836
7.	Rumbai Pesisir	1.091	1.067	952
8.	Sail	303	257	190
9.	Senapelan	967	991	765
10.	Sukajadi	995	1.008	827
11.	Tampan	727	887	725
12.	Tenayan Raya	1.770	1.910	1.675
	Jumlah	9.992	10.448	8.494

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima Program Indonesia Pintar, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah.
- b) Terdaftar dalam Dapodik sekolah.

Sementara itu, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari kantor Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), permasalahan yang berkaitan dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Di Kecamatan Bukit Raya mendapatkan data mengenai data

sekolah yang mendapatkan PIP disekitarnya dan adapun data terkait dengan sekolah untuk mendapatkan KIP Tahun 2017-2019 adalah berikut ini:

Tabel I. 3: Daftar Sekolah Menengah Pertama Program Indonesia Pintar di Kecamatan Bukit Raya Tahun Anggaran 2017.

No	Sekolah	Kelas		
		VII	VIII	IX
1.	PKMB AL-ILMI RIAU	-	-	2
2.	PKMB PAYUNG NEGERI	-	-	19
3.	SMP AZ ZUHRA SIMPANG TIGA	2	3	1
4.	SMP YLPI	3	8	2
5.	SMP IT BUNAYYA PEKANBARU	1	-	-
6.	SMP MUHAMMADIYAH 2	34	19	12
7.	SMP N 22 PEKANBARU	133	54	29
8.	SMP N 35 PEKANBARU	45	23	11
9.	SMP PGRI	107	40	28
10.	SMP WIDYA GRAHA	20	8	4
11.	SMP S JUARA	50	23	18
12.	SMP S YABRI TERPADU	21	10	4
	Total Data		734	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Tabel I. 4: Daftar Sekolah Menengah Pertama Program Indonesia Pintar di Kecamatan Bukit Raya Tahun Anggaran 2018.

NO	Sekolah	Kelas		
		VII	VIII	IX
1.	PKBM AL-ILMI RIAU	-	-	1
2.	PKBM MIFTAKHUL ULUM	1	-	3
3.	PKMB PAYUNG NEGERI	-	8	10
4.	PKMB PEKANBARU LAB SCHOOL	-	-	1
5.	SMP AZ ZUHRA SIMPANG TIGA	-	1	1
6.	SMP YLPI	-	-	2
7.	SMP IT BUNAYYA PEKANBARU	-	1	-
8.	SMP MUHAMMADIYAH 2	24	16	23
9.	SMP N 22 PEKANBARU	103	73	55
10.	SMP N 35 PEKANBARU	48	32	32
11.	SMP PGRI	43	60	45
12.	SMP WIDYA GRAHA	9	12	6
13.	SMP YLPI	5	-	-
14.	SMP JUARA	30	19	21
15.	SMP S YABRI TERPADU	13	7	13
	Total Data		745	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Tabel I. 5: Daftar Sekolah Menengah Pertama Program Indonesia Pintar di Kecamatan Bukit Raya Tahun Anggaran 2019.

No	Sekolah	Kelas		
		VII	VIII	IX
1.	SMP ZUHRA SIMPANG TIGA	-	-	2
2.	SMP IT BUNAYYA PEKANBARU	1	2	-
3.	SMP MUHAMADIYAH 2	14	4	9
4..	SMP N 22 PEKANBARU	64	31	68
5.	SMP N 35 PEKANBARU	43	24	35
6.	SMP PGRI	14	27	35
7.	SMP WIDYA GRAHA	2	5	12
8.	SMP YLPI	4	3	-
9.	SMP JUARA	15	19	20
10.	SMP YABRI TERPADU	18	8	10
	Total Data		514	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Besaran dana Program Indonesia Pintar yang diberikan perpeserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut:

- a. Peserta didik kelas VII dan VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp.750.000,00;
- b. Peserta didik kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.375.000,00;
- c. Peserta didik kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.375.000,00;
- d. Peserta didik kelas VIII dan IX semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp.750.000,00;
- e. Peserta didik Paket B diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp.750.000,00;

Dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar dana yang didapatkan oleh siswa dapat juga di gunakan sebagai pembayaran pokok sekolah seperti pembayaran SPP bagi sekolah Swasta, pembayaran buku maupun pakaian bagi sekolah Negeri. Namun, dalam pelaksanaannya pihak sekolah yang menyarankan kepada siswa penerima dana dari KIP untuk menyelesaikan pembayaran pokok sekolah.

Berikut rincian nama dan alamat sekolah, jumlah siswa, siswa penerima KIP, daftar jumlah SPP sekolah dan jumlah dana KIP sekolah di SMP Negeri dan Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru:



Tabel I. 6: Rincian Nama dan Alamat Sekolah, Jumlah Siswa, Siswa Penerima KIP, Jumlah Dana KIP PerSemester, Daftar Jumlah SPP Sekolah dan Sekolah Negeri dan Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

No	Nama Sekolah	Alamat	Jumlah Siswa	Jumlah Siswa Penerima Dana KIP	Jumlah Dana KIP PerSemester	Jumlah SPP Sekolah
1.	SMP N 22 KOTA PEKANBARU	JL. Sidodadi No. 35 Pekanbaru	934	163	Rp. 375.000	Gratis
2.	SMP N 35 KOTA PEKANBARU	JL. T. Bey/Reformasi II	635	102	Rp. 375.000	Gratis
3.	SMP S MUHAMMAD IYAH 2 KOTA PEKANBARU	JL. T. Bey/ (Utama I) Gg. Swadaya	242	27	Rp. 375.000	Rp.250.000 /bulan
4.	SMP S YLPI KOTA PEKANBARU	JL. Kaharudin Nasution Km 11 perhentian Marpoyan Pekanbaru	136	7	Rp. 375.000	Rp.350.000 /bulan

Sumber: Pihak Sekolah tahun 2019

Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait antara lain mencakup tingkat Sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, direktorat teknis, dan lembaga penyalur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pasal 14 menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP dilakukan oleh direktorat jenderal yang mengenai Pendidikan dasar dan menengah, direktorat jenderal yang menangani Pendidikan nonformal, dinas pendidikan provinsi, dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Direktorat teknis melakukan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada penerima melalui rekening tabungan/ virtual account dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun.
- Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,00;
- Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.

Selanjutnya pengambilan dana dapat dilakukan secara langsung oleh peserta didik ke bank melalui rekening tabungan dengan membawa tanda pengenal seperti: Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Pelajar/ Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Buku Tabungan.

Program KIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Peserta didik penerima Program Indonesia Pintar (PIP) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menggunakan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana.
- 2) Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun.
- 3) Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah,
- 4) Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

Program Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- 1) Pembelian buku dan alat tulis.
- 2) Pembelian pakaian dan perlengkapan (sepatu, tas, dll).
- 3) Transportasi peserta didik.
- 4) Uang saku peserta didik.
- 5) Biaya kursus/les tambahan.

Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Sumber dana bantuan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008. Kartu Indonesia Pintar juga menjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak.

Dalam hal ini sekolah memiliki peran penting pada pelaksanaan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Adapun peran dan fungsi sekolah/lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada seluruh warga sekolah.
- b) Sekolah wajib menerima pendaftaran anak-anak usia sekolah 6 sampai dengan 21 tahun pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan memutakhirkan (*updating*) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar.
- d) Menseleksi dan mengusulkan peserta didik calon penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai dengan sasaran prioritas.
- e) Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana Program Indonesia Pintar (PIP) telah siap diambil.

Dalam hal ini penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini yaitu di lembaga pendidikan itu sendiri, untuk memperoleh dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut maka siswa pemegang KIP harus melakukan beberapa prosedur atau mekanisme.

Berikut alur mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP):

Gambar I. 1: Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Berikut beberapa fenomena masalah yang terjadi dilapangan terkait dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru:

1. Siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena pembagian KIP yang tidak sesuai sasaran.
2. Penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) karena lemahnya pengawasan dari pihak Sekolah.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini melibatkan instansi terkait antara lain mencakup tingkat sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dinas Pendidikan provinsi, direktorat teknis dan lembaga penyalur.

Berdasarkan uraian fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dan mengacu pada rumusan masalah dalam hal ini peneliti menyimpulkan hasil sementara **“Bagaimanakah Pelaksanaan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?”**

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri dan Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.



2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis pada konsep Evaluasi dalam Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu.
2. Sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi di Universitas Islam Riau.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam Evaluasi dalam Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu.
2. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Agar penulisan karya ilmiah atau penelitian diperlukan konsep pada penelitian ini kemukakan landasan atau pijakan sebagai pondasi untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Penulis merangkai beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diatur peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong).

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang

bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Sedangkan Erliana Hasan (2010;2) menyatakan bahwa pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu kementerian yang diberi tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan negara.

Inu Kencana Syafi'i(2003;3) menyatakan bahwa di dalam kata dasar "Perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak legistimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat
3. Hal yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada Pemerintah yang sah
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Selanjutnya menurut Max Iver (dalam Labolo 2011;28) pemerintahan sebagai sebuah organisasi dari kelompok orang yang memiliki kekuasaan,dimana melalui kekuasaan,dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah.

Brasz mengatakan pemerintahan umum adalah pemerintahan yang sebagaimana menjadi kompetisi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi dari pada negara di dalam semua perwujudan (mulai dari negaa itu sendiri

provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi, perusahaan milik pemerintah) sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik (dalam Syafiie, 2007;35).

Lebih lanjut Ndraha (2005;36) menyatakan pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemerintahan dan perlindungan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Dalam Ilmu Pemerintahan, pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah menurut Rasyid (1997;13) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya Brasz (dalam Syafie. 2009;21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut Poeljie (dalam Syafie. 2009;21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafie. 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili dinas itu.

Menurut Soewargono (dalam Ndraha 2010;16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Sehingga melihat dari definisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan yang berlaku pada Negeri.

2. Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang berlaku yang seharusnya bersifat konsisten serta baik dari yang membuatnya ataupun yang menaatinya. Pentingnya

kebijakan menjadi salah satu ukuran dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan dijadikan sebagai tindakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk menghadapi suatu persoalan, baik dalam kehidupan pemerintah maupun dari sudut sektor privat. Kebijakan hendaknya bebas dari nuansa-nuansa politik yang sering mencoreng kepercayaan beberapa pihak dikarenakan identik dengan keberpihakan pada yang menguntungkan ataupun karena adanya kepentingan.

Hermino (2018;125) mengatakan bahwa setiap merumuskan kebijakan harus di pastikan bahwa kebijakan itu menjangkau masa depan. Oleh sebab itu, pelaku kebijakan sering kali belum ada saat kebijakan itu di tetapkan. Sehingga dapat menyebabkan tidak tepatnya kebijakan itu sendiri karena belum jelasnya antisipasi tentang pengaruh timbal balik antara pelaku dan lingkungannya. Kebijakan dapat dimaknai dengan tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017;5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan/dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah, karenanyaimplikasi terhadap hakikat kebijakan public adalah: pertama, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yangdilakukan oleh pejaabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan keempat, berbentuk positif dan bisa pula negarif.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, social, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten kota, dan keputusan bupati/walikota.

Kebijakan menurut Nugroho (2008:58) adalah keputusan yang di buat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Selanjutnya Dunn mengatikan kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemeintah (Dunn,2003;132).”

Menurut David Easton (dalam Anggara,2014;35) kebijakan publik adalah mengalokasikan nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Menurut Dye (dalam Indiahono, 2009;17) kebijakan haruslah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintahan. Sedangkan Dye dalam Islamy (2000;19) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan,

dan hasil yang membuat sebuah kehidupan Bersama. Dalam arti ini, maka kebijakan publik adalah: usaha untuk memahami dan memberi arti tentang apa yang:

- 1) Dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah.
- 2) Menyebabkan atau apa yang mempengaruhinya.
- 3) Menjaga dampak dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Sutopo (2001:10) mengatakan Kebijakan Publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan Publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Suharto istilah kebijakan social diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian spesifik, yakni menyangkut bidang kesejahteraan sosial (Suharto, 2008;9). Menurut Marshall kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga Negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (dalam Suharto, 2008;10).

Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2004;53) mendefinisikan kebijakan publik “sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu”, (*a projectod program of goals, values and practies*). Selanjtnya David Easton dalam Nugroho (2004;53) menyebutkan kebijakan publik “sebagai aktivitas pemerintah”, (*the impact government*).

Kebijakan Publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis atau pun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari pada actor yang terlibat dalam proses kebijakan khususnya pada proses perumusan. Nugroho (2004;54) mendefinisikan kebijakan publik: “Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan”.

Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan pada tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik danekspesif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki (Tingkilisan,2003;6).

Kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dai kebijaksanaan (Ibahim, 2004;2).

Menurut Ibrahim (2004;60-61) setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif. Tolak ukur kebijakan public yang baik antara lain:

- a. Berkeadilan sosial
- b. Partisipasi pembangunan secara keseluruhan
- c. Peduli lingkungan
- d. Pelayanan publik yang berkualitas
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara
- f. Pertanggungjawabanyang professional

- g. Analisis etis (jujur, objektif, adaptif).

Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, yang disampaikan oleh Eulau dan Prewitt (dalam Agustino, 2016;17) kebijakan adalah ‘keputusantetap’ yang didirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Kebijakan publik merupakan proses pembuat keputusan seperti pernyataan Jenkins (dalam Agustino, 2016;17) menyatakan kebijakan publik sebagai “serangkaian keputusan yang saling berhubungan”. Dalam kata lain kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak *stakeholders*.

4. Konsep Evaluasi

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah yang telah terselesaikan, tetap juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyusuaian dan perumusan kembali masalah.

Menurut Subarsono (2009;119) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengikuti tingkat evaluasi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujuk untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif dan negative.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi poses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Evaluasi menurut Hmzah B. Uno dan Satria Kuno (2013) menjelaskan evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas hasil pengukuran dengan membandikan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu.

Menurut Suharsimi Arikuntup dan Capi SAJ (2004), menjelaskan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keterlaksanaan suatu kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksanakan dan apa sebabnya.

Menurut William N Dunn (dalam Riant Nugroho,2009;536), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*).

Evaluasi menurut Edwar A. Suchman (dalam Riant Nugroho,2003;1999) disisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Mengendifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi standardisasi kegiatan

- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang di amati merupakan akibat dari kegiatan atau karena penyebab yang lain
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi menurut Ndraha (1999;21) yaitu perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisis akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau di lanjutkan. Sedangkan menurut Worthen dan Sanders evaluasi adalah mengukur nilai (*merit*) dan manfaat (*worth*) dari objek evaluasi (dalam Wirawan, 2011;2).

Dalam bukunya Winarno (2007;230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Mengikuti William N. Dunn (2013;608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksian (*appraisal*), pemberi angka rating, dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan

rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan evaluasi kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada proses: perumusan dari pada muatan kebijakan yang biasanya hanya melalui apakah prosesnya sudah selesai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2013), mencakup 6 (enam) indikator yaitu:

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, seberapa hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
4. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat perferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
6. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Menurut Mardikanto (2013;275) evaluasi sebagai suatu kegiatan, sebenarnya merupakan proses untuk mengetahui atau memahami dan memberi penilaian terhadap suatu keadaan tertentu, melalui kegiatan pengumpulan data atau fakta dan membandingkan dengan ukuran serta cara pengukuran tertentu yang telah ditetapkan.

Menurut Kertonegoro (1998;96) evaluasi adalah proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menuntun arah ketujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Esensi

evaluasi terletak pada evaluasi langkah yang ada kaitannya dengan hasil yang ditentukan dalam proses perencanaan.

Menurut Nurcholis (2005;169) evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuatan keputusan. Menurut Sudjana (2006;7) evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan/atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Yusuf (2000;3) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.

5. Konsep Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah, direktorat jenderal yang menangani pendidikan nonformal, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Kementerian pendidikan dan kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan ditingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan diketahui oleh Wakil Presiden memberibantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban baya yang teralaluberat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah mmemberi bantuan pendidikan berupa Karu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

Tujuan dari Program Indonesia Pintar yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016 adalah:

- a) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

- b) Meringankan biaya personal pendidikan.
- c) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- d) Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) adalah peserta didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan:

- a) Peserta didik Pemegang KIP.
- b) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 1. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
 2. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 3. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan.
 4. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam.
 5. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah.
 6. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
 7. Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12.
 8. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan pelayaran /kemaritiman.

Pengusulan penerima dana Program Indonesia Pintar dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a) Peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) melaporkan kepemilikan kartunya ke sekolah untuk didata sebagai calon penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).
- b) Bagi anak-anak penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum/tidak berstatus sebagai peserta didik, diharapkan melaporkan kartunya ke sekolah dan/atau SKB/PKBM atau lembaga pendidikan non formal lainnya sebagai identitas prioritas calon peserta didik dan penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).
- c) Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dengan cara mengentri atau memutakhirkan (*updating*) data peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap, terutama pada kolom berikut:
 - 1) Nama Siswa
 - 2) Tanggal Lahir
 - 3) Nama Ibu Kandung
 - 4) Nomor Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- d) Untuk jenjang SD dan SMP, dinas Kabupaten/kota mengusulkan peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai calon penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) melalui aplikasi pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat di akses di laman:
Data.dikdasmen.kemdikbud.o.id/pipdikdasmen.
- e) Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan tertulis, dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan daftar peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari sekolah ke direktorat teknis terkait. Data inimerupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

Selanjutnya dana Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan langsung ke peserta didik penerima melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang tercantum dalam surat keputusan direktur ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening.
- 2) Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur,
- 3) KPPN menyalurkan dana sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur.
- 4) Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga penyalur.
- 5) Direktorat teknis menginformasikan daftar peserta didik penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima.
- 6) Dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan informasi surat keputusan ke sekolah/satuan pendidikan nonformal.
- 7) Sekolah/satuan pendidikan nonformal meneruskan informasi surat keputusan ke peserta didik/orang tua/wali.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang digunakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel II. 1: Peneliti terdahulu terkait Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Nama penelitian	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
Yona Aprilia Universitas Islam Riau	Implementasi Kebijakan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan Sma Negeri 1 Kampar Kiri Kabupaten Kampar	2018	Persamaan penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang befokus kepada Program Kartu Indonesia Pintar	Perbedaan yang ada antara penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah dari segi teori, waktu dan lokasi peneliti
Saras Setyawati Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto	Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Bagi Siswa Smk Di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar)	2018	Persamaan antara penelitian yang sedang penulis kerjakan dengan penelitian yang menjadi acuan penulis dalam penelitian terdahulu ini adalah fokus penelitian yang ada pada program pemerintah untuk menjalani Program Kartu Indonesia Pintar.	Sementara perbedaan yang ada antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah dari segi waktu, lokasi universitas, dan juga dinas atau aparatur pemerintah yang menjadi tempat

				penelitian penulis.
Ahmad Universitas Gajayana	Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia)	2018	Adanya persamaan dalam variabel, contohnya Program Kartu Indonesia Pintar	Perbedaan dari usulan penelitian ini adalah teori penelitian yang digunakan
Nurul Fadhillah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan	Analisis Evaluasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Indonesia	2018	Adanya kesamaan dalam penelitian yang sedang penulis kerjakan dengan penelitian yang menjadi acuan penulis dalam penelitian terdahulu ini adalah fokus penelitian yang ada pada program pemerintah untuk menjalani Program Kartu Indonesia Pintar.	Sementara perbedaan yang ada antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah metode yang digunakan
Ebni Sholikhah Universitas Negeri Yogyakarta	Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Oleh Siswa SMPN 2 Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul	2018	Persamaan penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang befokus kepada Program Kartu Indonesia Pintar	Sementara perbedaan yang ada antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah dari segi waktu, lokasi universitas, dan juga metode yang di gunakan.

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2019

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur penulisan karya ilmiah atau penelitian yang dilakukan yang didalamnya menjelaskan tentang keterkaitan antara konsep dengan teori-teori serta indikator-indikator relevan dan dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam peneliti yang peneliti lakukan terhadap evaluasi program penyaluran Kartu Indonesia Pintar dalam usaha meningkatkan Pendidikan masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan variabel penelitian “Evaluasi”, selanjutnya di ukur dengan beberapa teori yang kemudian peneliti jadikan sebagai kerangka pikir, dan peneliti menggunakan teori dari William N Dunn (dalam Riant Nugroho, 2009;537). Dari poin-poin kinerja dari teori William N Dunn, penulis menggunakan 6 poin sebagai indikator.

Adapun indikator yang digunakan adalah efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Selanjutnya di gambarkan sebagai berikut:

Gambar II. 1: Kerangka Pikir Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.



Sumber: Olahan Penulis Tahun 2019

D. Konsep Operasional

Teori operasional adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

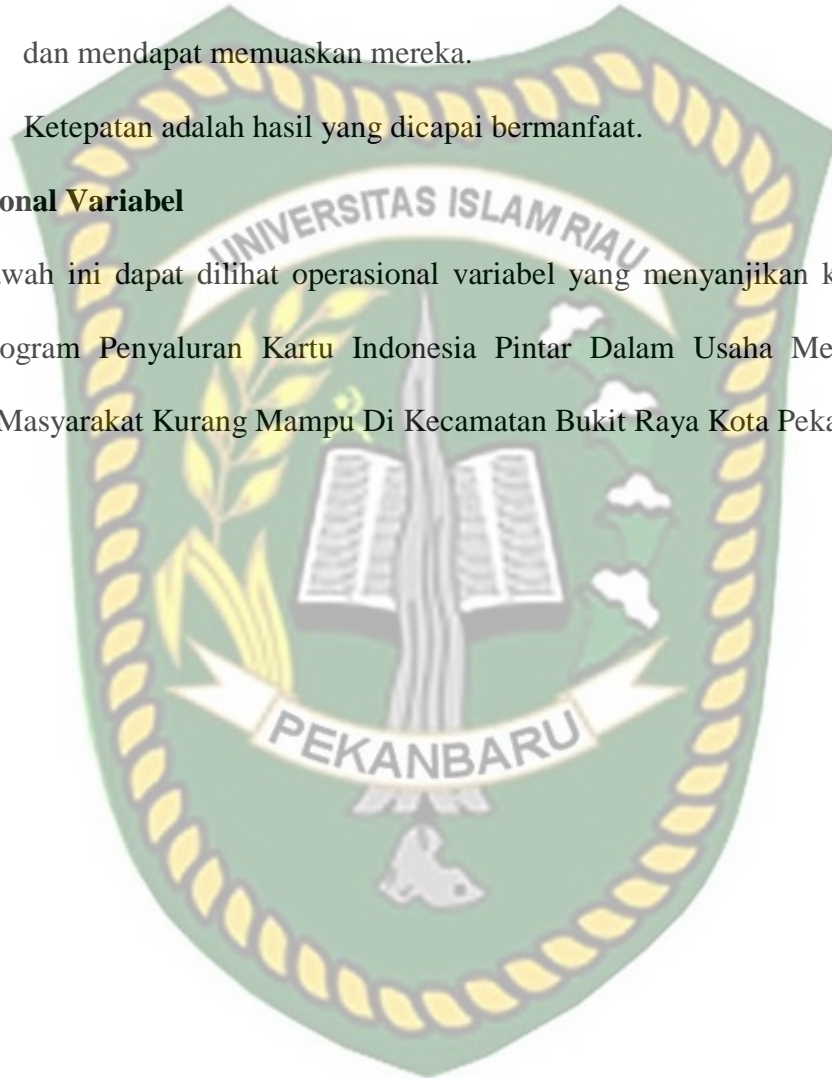
Untuk menghindari kesalah pahaman tentang konsep atau pun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengoperasikan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini:

- 1) Evaluasi adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang terjadi sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisis akhir apakah suatu kejadian harus revisi atau dilanjutkan.
- 2) Pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan suatu yang lebih besar dari pada suatu kementerian yang diberi tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan negara.
- 3) Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang berlaku yang seharusnya bersifat konsisten serta baik dari yang membuatnya ataupun yang menaatinya. Pentingnya kebijakan menjadi salah satu ukuran dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Kebijakan Publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.
- 5) Indikator variabel Evaluasi adalah:
 - a) Efektifitas adalah pencapaian suatu hasil yang diinginkan.
 - b) Efisiensi adalah usaha-usaha yang diperlukan mencapai suatu hasil yang diinginkan.
 - c) Kecukupan adalah seberapa hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah bagi SMP Negeri dan SMP Swasta.

- d) Perataan adalah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda.
- e) Responsivitas adalah hasil dari kebijakan yang memuat nilai kelompok dan mendapat memuaskan mereka.
- f) Ketepatan adalah hasil yang dicapai bermanfaat.

E. Operasional Variabel

Dibawah ini dapat dilihat operasional variabel yang menyajikan konsep dari Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.



Tabel II. 2: Operasional Variabel Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Evaluasi menurut William N Dunn (dalam Riant Nugroho,2009:536) Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>assessment</i>).	Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu	Efektifitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya target / sasaran - Tercapainya tujuan
		Efesiensi	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam mencapai hasil KIP yang telah ditetapkan
		Kecukupan	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan pemenuhan dana bagi siswa
		Perataan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan layanan yang diberikan - Keadilan bantuan dana yang diberikan
		Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Program dapat menyelesaikan masalah
		Ketepatan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya manfaat program bagi siswa - Ketepatan tujuan program

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode peneliti pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Ada pun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam Ahmadi (2016:14) mengemukakan bahwa peneliti Kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistic terhadap pokok persoalannya. Ini berarti para peneliti kualitatif segala sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut. Oleh karena itu menfokuskan pada penggambaran dan pemecahan yang dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Dengan memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang sesuai dengan situasi substansial yang dihadapi, untuk itu perlu data yang akurat dan harus dikumpulkan dan kemudian dianalisa secara sistematis demi ketetapan dalam pengkajiannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ada pada daerah Kota Pekanbaru. Lokasi yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian ada pada beberapa SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yaitu SMP N 22 Kota Pekanbaru, SMP N 35 Kota Pekanbaru, SMP S YLPI Kota Pekanbaru, dan SMP Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian dikarenakan dapat mempermudah penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian dan juga menjadi salah satu tempat yang pelaksanaan kebijakannya.

C. Informan dan Key Informan

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi Program Kartu Indonesia. Menurut. Menurut Bangong Suyanto (2005;172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota pekanbaru.

Tabel III. 1: Daftar Informan dan Key Informan Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Erma Susilawati, S.Pd	Kepala Seksi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Key Informan
2.	Muhammad Fachri, S.Kom	Operator PIP SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Informan
3.	Eviwijriati, S.Pd	Wakil Kepala SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru	Informan
4.	Zulfirina, S.Pd	Wakil Kesiswaan SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru	Informan
5.	Erni.M, S.Pd	Wakil Kepala SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru	Informan
6.	Syarifah Nurafidah, S.Pd	Wakil Kesiswaan SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru	Informan
7.	Sri Rama Yanti, S.Si	Kesiswaan SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru	Informan
8.	Desmarita Susanti, S.Pd	Wakil Kurikulum SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru	Informan
9.	Muklis, S.Pd	Wakil Kurikulum SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru	Informan
10.	Ade Sutian, S.Pd	Wakil Kesiswaan SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru	Informan
11.	Elly Sazdiana	Orang Tua Murid SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru	Informan
12.	Wiwit	Orang Tua Murid SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru	Informan

Sumber: Data Olahan Peneliti 2019

D. Jenis dan Sumber Data

Data-data utama yang paling penting dari pihak-pihak terkait dijadikan sebagai referensi setelah di olah. Ada pun dalam penelitian ini data yang di butuhkan terdiri dari data primer dan data skunder.

1. Data primer

Data Primer adalah data yang secara langsung yang terdiri dari beberapa indikator yang memperoleh hasil analisa yang juga hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari Observasi dan Wawancara.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan dari lembaga atau instansi yang berkaitan atas masalah yang di teliti. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang di perlukan, maka peulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan kepada informan berdasarkan tujuan peneliti, dan memperoleh keterangan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan Tanya jawab langsung Face To Face kepada pihak-pihak yang terkait dengan alasan sumber informasi untuk memperoleh data.

3. Dokumentasi pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data yang berbentuk dokumen yang berisikan data yang penting, baik itu berbentuk teoritis maupun data konkrit yang terdapat dilapangan. Dapat digunakan dan sangat diperlukan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan variable dan indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian peneliti.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisa secara Kualitatif, yaitu suatu penilaian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum dengan penjelasan secara interpretatif yaitu usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran dan perkiraan logis atas dasar yang diperoleh, terutama untuk mengetahui bagaimana gambaran umum tentang Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

G. Jadwal Waktu Kegiatan

Tabel III. 2: Jadwal waktu kegiatan penelitian Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-																							
		November-Februari				Maret				April				Mei - Juli				Agustus - September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survei																								
6	Survei Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komferehensi Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambar Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 104 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baru” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah

ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKAN BAHARU”, yang dalam Bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

2. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°45' Lintang Utara. dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 –11 meter. berdasarkan peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ±62,96 Km² menjadi ±446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Untuk lebih lanjutnya dapat di lihat jumlah kecamatan dan luas wilayah kota Pekanbaru pada table berikut ini:

Tabel IV. 1: Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase Luas
1.	Tampan	63,08	9,98
2.	Payung Sekaki	52,63	8,32
3.	Bukit Raya	94,56	14,96
4.	Marpoyan Damai	89,86	14,21
5.	Tenayan Raya	108,84	17,21
6.	Limapuluh	4,04	0,64
7.	Sail	3,26	0,52
8.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9.	Sukajadi	5,10	0,81
10.	Senapelan	6,65	1,05
11.	Rumbai	105,23	16,64
12.	Rumbai Pesisir	96,75	15,30

Sumbe: BPS Kota Pekanbaru 2019

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

1. Sebelah Utara : Kabupatn Siak dan Kabupaten Kampar.
2. Sebelah Selatan : Kcamatan Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
4. Sebelah Barat : Kabupatn Kampar.

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C – 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C – 23,0°C. Curah hujan antara 38,6 – 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

3. Kependudukan

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru ini juga dikenal dengan julukan Madani di Provinsi Riau. Kota ini memiliki luas 63,3 Km² dan berpenduduk 1,1 juta jiwa pada tahun 2019. Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tampan yaitu 194.331 jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Tenayan Raya 142.519 jiwa/Km². Selain itu enam Kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Marpoyan Damai, Bukit Raya, Rumbai, Sukajadi, Limapuluh, Senapelan masing-masing 141.569 jiwa/Km², 106.167 jiwa/Km², 73.231 jiwa/Km², 49.336 jiwa/Km², 43.982 jiwa/Km² dan 38.183 jiwa/Km². Sedangkan empat Kecamatan yang relative jarang penduduknya yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa/Km², Sail 22.956 jiwa/Km², Payung Sekaki 9.917 jiwa/Km², dan Rumbai Pesisir dengan 7.297 jiwa/Km².

Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk.

4. Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara administrative dipimpin oleh seorang wali kota. Efektivitas pemerintahan kota di Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Wali Kota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada 9 November 1959, kembali diunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai wali kota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri.

a. Orde Baru

Dimulai dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan munculnya hegemoni satu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A Rahman Hamid, yang memerintah lebih dari 10 tahun.

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penertiban periode pemerintahan kota, dan pada 5 Juli 1981, terpilih Ibrahim Arsyad, S.H., pada 1 Juli



1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada 22 Juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H., memerintah selama dua periode.

b. Otonomi Daerah

Memasuki era pemerintahan otonomi daerah yang luas, telah menimbulkan *euphoria* yang berlebihan pada beberapa kelompok masyarakat di Pekanbaru, kecendrungan tertentu terutama berkaitan dengan politik dan ekonomi, mendorong masyarakatnya berlaku diskriminasi. Klaim beberapa kelompok masyarakat atas keutamaan mereka dibandingkan kelompok lainnya, dapat menjadi api dalam sekam, jika dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegrasi pada masyarakat kota Pekanbaru.

B. Profil Sekolah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

1. SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru

Nama Sekolah	: SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru
Nama Kepala Sekolah	: Dailami, SE, S.Pd
Alamat Sekolah	: JL. Sidodadi No. 32 Pekanbaru
Kecamatan	: Bukit Raya
Kota	: Pekanbaru
Provinsia	: RIAU
Dibuka Tahun	: 1992
NSS	: 20.1.09.60.08.061
NIS	: 200610
No. Sertifikasi	: 409/BAP-SM/KP-09/xii/2009

Akreditasi Sekolah : A
Lingkungan Sekolah : Aman Terkendali
Status Sekolah : Negeri
Jenis Sekolah : Rintisan SSN
Luas Pekarangan Sekolah : 700M²

1. Visi Dan Misi Sekolah SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru

Visi: “Terwujudnya warga sekolah yang tertib, terampil optimis, beriman dan bertaqwa serta peduli lingkungan”

Misi

1. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman agama untuk membentuk moral dan pribadi yang berakhlak mulia.
2. Meningkatkan perolehan nilai ujian sekolah dan ujian nasional.
3. Mengoptimalkan kompetensi guru dan siswa dalam pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
4. Meningkatkan potensi siswa melalui kegiatan pengembangan diri.
5. Menumbuhkembangkan sikap disiplin untuk membentuk mental yang kuat dan bertanggung jawab.
6. Menumbuhkembangkan cinta budaya melayu dalam prestasi bidang seni.
7. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris guru dan siswa melalui English club untuk menyambut era globalisasi.
8. Meningkatkan kegiatan wiyata mandala dan K3 lingkungan sekolah yang bermutu.
9. Melaksanakan manajemen partisipatif dengan seluruh warga dan komite sekolah sebagai bentuk perwujudan MBS (manajemen berbasis sekolah).

2. Kondisi Siswa

Table IV. 2: Kondisi Siswa Sekolah SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru

Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa			
	VII	VIII	IX	Jumlah
2018/2019	321	330	283	934

Sumber: Data Olahan Sekolah 2019

3. Kondisis Guru Sekolah/ Pegawai

- a. Kepala Sekolah : 1 orang
- b. Guru PNS : 40 orang
 - Sudah Sertifikasi : 39 orang
 - Belum Srtifikasi : 1 orang
- c. Guru Honor/ GTT : 4 orang
 - Guru Bantu : -
 - Guru GTT : -
 - Guru Honor Sekolah : 4 orang
- d. Pegawai Tata Usaha : 7 orang
 - PNS : 7 orang
 - Honor Kota : -
 - Honor Sekolah : 4 orang
- e. Penjaga Sekolah : 1 orang

4. Sarana Dan Prasarana

Tabel IV. 3: Sarana dan Prasarana Sekolah SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru

Ruangan	Jumlah
Kelas	23
Laboratorium	2
Perpustakaan	1
Kepala Sekolah	1
Tatat Usaha	1
Majelis Guru	1
Gudang	3
OSIS	1
Ruang BK	1

UKS	1
Mushallah	1
Ruang Wakil	1
Ruang Koperasi	1
Ruang Komputer	1

Sumber : Data Olahsan Sekolah 2019

5. Kondisi Sarana Olahraga

Tabel IV. 4: Kondisi Sarana Olahraga Sekolah SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru

No.	Lapangan	Jumlah
1.	Basket	1
2.	Volly Ball	1
3.	Futsal	1
4.	Takraw	1
5	Batminton	1

Sumber: Data Olahsan Sekolah 2019

2. SMP Negri 35 Kota Pekanbaru

Nama Sekolah : **SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru**

Nama Kepala Sekolah : Indrawati,S.Pd

Alamat Sekolah : JL. T.Bey / Reformasi II

Kelurahan : Simpang Tiga

Kecamatan : Bukit Raya

Kota : Pekanbaru

Provinsia : RIAU

Dibuka Tahun : 2008

NSS : 20.1.09.60.08.074

NIS : 10495043

Kategori Sekolah : Reguler

Akreditasi Sekolah : A
 Status Sekolah : Negeri
 Luas Tanah : 7.500 meter
 Luas Bangunan : 1.296 meter

1. Visi Dan Misi Sekolah SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru

Visi : “Terwujudnya SMP Negeri 35 Pekanbaru dengan peserta didik yang kreatif, berprestasi, disiplin, jujur, berwawasan lingkungan, dan peduli sosial yang berlandaskan iman dan taqwa.”

Misi :

1. Menciptakan peserta didik yang kreatif dengan beragam hasil cipta di bidang seni dan budaya.
2. Menciptakan peserta didik yang berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik.
3. Terwujudnya kesadaran kedisiplinan mengikuti aturan dan ode etik sekolah.
4. Tertanam sikap jujur baik dari ucapan, sikap dan perbuatan.
5. Terwujudnya sekolah yang berwawasan lingkungan, lingkungan yang hijauh, rindang dan asri.
6. Menjadikan peserta didik yang terbiasa berperilaku peduli sosial, saling tolong menolong dan hidup bersosial.
7. Tercipta kesadaran taat melaksanakan perintah tuhan yang maha esa, menjadikan amalan ibadah sebagai kebutuhan.

2. Kondisi Siswa

Table IV. 5: Kondisi Siswa Sekolah SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru

Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa			
	VII	VIII	IX	Jumlah
2018/2019	199	216	220	635

Sumber: Data Olahan Sekolah 2019

3. Kondisis Guru Sekolah/ Pegawai

- a. Kepala Sekoalah : 1 orang
- b. Guru PNS : 33 orang
 - Sudah Sertifikasi : 30 orang
 - Belum Srtifikasi : 3 orang

- c. Guru Honor/ GTT : 5
 - Guru Bantu : -
 - Guru GTT : -
 - Guru Honor Sekolah : 5 orang
- d. Pegawai Tata Usaha : 5 orang
 - PNS : 3 orang
 - Honor Kota : -
 - Honor Sekolah : 2 orang
- e. Penjaga Sekolah : 1 orang

4. Sarana Dan Prasarana

Tabel IV. 6: Sarana dan Prasarana Sekolah SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru

Ruangan	Jumlah
Kelas	16
Laboratorium	1
Perpustakaan	1
Kepala Sekolah	1
Tatat Usaha	1
Majelis Guru	1
Gudang	-
OSIS	1
Ruang BK	1
UKS	1
Mushallah	1
Ruang Wakil	-
Ruang Koperasi	1
Ruang Komputer	-

Sumber : Data Olahan Sekolah 2019

5. Kondisi Sarana Olahraga

Tabel IV. 7: Kondisi Sarana Olahraga Sekolah SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru

No.	Lapangan	Jumlah
1.	Basket	1
2.	Volly Ball	1
3.	Futsal	1
4.	Takraw	1
5	Batminton	1

Sumber: Data Olahsan Sekolah 2019

3. SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru

Nama Sekolah : **SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru**

Nama Kepala Sekolah : **Suhardi S.Pd**

Alamat Sekolah : **JL. Kaharuddin Nasution Km 11 perhentian Marpoyan Pekanbaru**

Kelurahan : **Simpang Tiga**

Kecamatan : **Bukit Raya**

Kota : **Pekanbaru**

Provinsia : **RIAU**

Dibuka Tahun : **1987**

NSS : **204096008066**

NIS : **200606**

Akreditasi Sekolah : **A**

Lingkungan Sekolah : **YLPI**

Status Sekolah : **Swasta**

Luas Pekarangan Sekolah : **2491 meter**

1. Visi Dan Misi Sekolah SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru

Visi : “Terwujudnya sekolah yang mengaktualisasikan dasar-dasar keilmuan dalam mempersiapkan generasi islam berkualitas, beraqidah dan berakhlak sesuai Al-qur’an dan Sunnah”.

Misi :

1. Memberikan pelayanan pendidikan Islam, melalui kurikulum nasional dan kurikulum Plus YLPI Riau.
2. Mengenalkan, menyatukan, dan mengaplikasikan dasar-dasar keislaman dan keilmuan dengan skill/ telenta, ilmu pengetahuan dan sikap islami dalam menembuhkembangkan potensi peserta didik menuju insan bertaqwa dan berdaya guna.

2. Kondisi Siswa

Table IV. 8: Kondisi Siswa Sekolah SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru

Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa			Jumlah
	VII	VIII	IX	
2018/2019	51	46	39	136

Sumber: Data Olahan Sekolah 2019

3. Kondisis Guru Sekolah/ Pegawai

- a. Kepala Sekoalah : 1
- b. Guru PNS : -
 - Sudah Sertifikasi : 4
 - Belum Srtifikasi : 16
- c. Guru Honor/ GTT : -
 - Guru Bantu : -
 - Guru GTT : -
 - Guru Honor Sekolah : -
- d. Pegawai Tata Usaha : 3
 - PNS : -
 - Honor Kota : -
 - Honor Sekolah : -
- e. Penjaga Sekolah : 2

4. Sarana Dan Prasarana

Tabel IV. 9: Sarana dan Prasarana Sekolah SMP Suwasta PGRI Kota Pekanbaru

Ruangan	Jumlah
Kelas	6
Laboratorium	1
Perpustakaan	1
Kepala Sekolah	1
Tatat Usaha	1
Majelis Guru	1
Gudang	1
OSIS	1
Ruang BK	1
UKS	1
Mushallah	1
Ruang Wakil	1
Ruang Koperasi	-
Ruang Komputer	-

Sumber : Data Olahan Sekolah 2019

5. Kondisi Sarana Olahraga

Tabel IV. 10: Kondisi Sarana Olahraga Sekolah SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru

No.	Lapangan	Jumlah
1.	Basket	1
2.	Volly Ball	1
3.	Futsal	1
4.	Takraw	1
5	Batminton	1

Sumber: Data Olahan Sekolah 2019

4. SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru

Nama Sekolah : SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru

Nama Kepala Sekolah : Meri Julinda, S. Ag

Alamat Sekolah : JL. T. Bey (Utama I) Gg. Swadaya
Kelurahan : Simpang Tiga
Kecamatan : Bukit Raya
Kota : Pekanbaru
Provinsia : RIAU
Dibuka Tahun : 2006
NSS : 20.4.09.60.08.076
NIS : 10404488
Akreditasi Sekolah : A
Status Sekolah : Swasta
Luas Pekarangan Sekolah : 3.613 meter

1. Visi Dan Misi Sekolah SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru

Visi : “Terwujudnya jiwa yang beriman unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan”

Indikator Visi :

1. Unggul dalam prestasi akademis dengan nilai UN di atas rata-rata.
2. Unggul dalam prestasi akademis menjadi juara setiap perlombaan tingkat Kota dan Provinsi.
3. Unggul dalam prestasi Reliqi.
4. Unggul dalam prestasi budaya, olahraga,

Misi :

1. Menumbuhkan penghayatan dan pengamatan terhadap ajaran islam melalui pembelajaran terpadu, Iqra', Tadarus Al-Qur'an, Sholat Zuhur berjama'ah serta tahfizul qur'an dan mengembangkan bakat dalam muhadhorah.
2. Menumbuhkan semangat disiplin dalam semua aspek.
3. Mendorong siswa untuk mengenali potensi dari dan meningkatkan keterampilan berbahasa inggris, Bahasa arab, karya tulis ilmiah, desaignrafis (TIK).
4. Mendorong siswa untuk mengenali diri dan meningkatkan kreatifitas dalam seni dan olahraga.
5. Meningkatkan pembelajaran efektif tuntas minimal tercapai lulusan 100%.]

6. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan gerakan penghijauan bebas dalam polusi.
7. Menerapkan perilaku sehat dan ramah lingkungan serta 5S (salam, sanyum, sapa, sopan, santun).
8. Membangun karakter siswa peduli lingkungan budaya bersih dan jujur.
9. Mendorong siswa untuk menggali diri dan meningkatkan kreatifitas dalam program unggulan seperti tahfizul qur'an, pencat silat, hw, olahraga, IPTEK.

Moto : “Berubah peduli dan berbagi”

Indikator Moto:

1. Berubah untuk yang lebih baik.
2. Peduli kepada sesame guru, karyawan, dan siswa serta lingkungan.
3. Berbagai tenaga, pikiran, dan materi untuk mewujudkan sekolah yang tertib, tentram, nyaman, sejahtera, dan transparan.

2. Kondisi Siswa

Table IV. 11: Kondisi Siswa Sekolah SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru

Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa			Jumlah
	VII	VIII	IX	
2018/2019	92	71	79	242

Sumber: Data Olahan Sekolah 2019

3. Kondisis Guru Sekolah/ Pegawai

- a. Kepala Sekoalah : 1
- b. Guru PNS : -
 - Sudah Sertifikasi : 8
 - Belum Srtifikasi : 13
- c. Guru Honor/ GTT : -
 - Guru Bantu : -
 - Guru GTT : 8
 - Guru Honor Sekolah : 13
- d. Pegawai Tata Usaha :
 - PNS : -
 - Honor Kota : -

- Honor Sekolah : 2
 - Karyawan Tetap : 3
- e. Penjaga Sekolah : 1

4. Sarana Dan Prasarana

Tabel IV. 12: Sarana dan Prasarana Sekolah SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru

Ruangan	Jumlah
Kelas	10
Laboratorium	2
Perpustakaan	1
Kepala Sekolah	1
Tatat Usaha	1
Majelis Guru	1
Gudang	1
OSIS	1
Ruang BK	1
UKS	1
Mushallah	1
Ruang Wakil	1
Ruang Koperasi	1
Ruang Komputer	1

Sumber : Data Olahan Sekolah 2019

5. Kondisi Sarana Olahraga

Tabel IV. 13: Kondisi Sarana Olahraga Sekolah SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru

No.	Lapangan	Jumlah
1.	Basket	1
2.	Volly Ball	1
3.	Futsal	1
4.	Tenis Meja	1
5	Batminton	2

Sumber: Data Olahan Sekolah 2019

C. Fungsi Dan Tugas Organisasi Sekolah

1. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah

a) Kepala Sekolah Sebagai Pendidikan (*Educator*)

- Membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan program pengajaran dan remedial.
- Membimbing karyawan dalam hal menyusun program kerja dan melaksanakan tugas sehari-hari.
- Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, OSIS dan mengikuti lomba diluar sekolah.
- Mengembangkan staf melalui pendidikan/ latihan, melalui pertemuan, seminar dan diskusi, menyediakan bahan bacaan, memperhatikan kenaikan pangkat, mengusulkan kenaikan jabatan melalui seleksi calon Kepala Sekolah.
- Mengikuti Perkembangan IPTEK Melalui Pendidikan/latihan, pertemuan, seminar, diskusi dan bahan-bahan.

b) Kepala Sekolah sebagai Manajer (*Manager*)

- Mengelola administrasi kegiatan belajar dan bimbingan konseling dengan memiliki data lengkap administrasi kegiatan belajar mengajar dan kelengkapan administrasi bimbingan konseling.
- Mengelola administrasi kesiswaan dengan memiliki data administrasi tenaga guru, karyawan (TU/laboran/teknisi/ perpustakaan).
- Mengelola administrasi keuangan, baik administrasi keuangan rutin.
- Mengelola administrasi sarana/prasarana baik administrasi gedung/ruang, alat laborattorium, perpustakaan.

c) Kepala Sekolah sebagai Pengelola Administrasi (*Administrator*)

- Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

- Menyusun organisasi ketenagaan di sekolah, baik Wakasek, Wali kelas, Ka TU, Bendahara, Personalia kegiatan temporer, seperti Panitia Ujian, panitia peringatan hari besar nasional atau keagamaan dan sebagainya.
- Menggerakkan staf/guru/karyawan dengan cara memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.
- Mengoptimalkan sumber daya manusia secara optimal, memanfaatkan sarana/prasarana secara optimal dan merawat sarana prasarana milik sekolah.

d) Kepala Sekolah Sebagai Penyelia (*Supervisor*)

- Menyusun program supervise kelas, kegiatan ekstra kurikuler dan sebagainya.
- Melaksanakan program supervise baik supervise kelas, dadakan, kegiatan ekstra kurikuler dan lain-lain.
- Memanfaatkan hasil supervise untuk meningkatkan kinerja guru/karyawan dan untuk pengembangan sekolah.

e) Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (*Leader*)

- Memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani mengambil resiko dan berjiwa besar.
- Memahami kondisi anak buah, baik guru, karyawan dan adak didik.
- Memiliki visi dan memahami misi sekolah.
- Mampu mengambil keputusan baik urusan internal maupun eksternal.
- Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan.

f) Kepala Sekolah sebagai Pembaharu (*Inovator*)

- Mampu menvari, menemukan dan mengadopsi gagasan baru dari pihak lain.
- Mampu melakukan pembaharuan di bagian kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling, pengadaan dan pembinaan tenaga guru dan karyawan, kegiatan ekstra kurikuler dan mampu melakukan

pembaharuan dalam menggali sumber daya manusia di Dewan Sekolah san masyarakat.

g) Kepala Sekolah sebagai Pendorong (*Motivator*)

- Mampu mengatur lingkungan kerja.
- Mampu mengatur pelaksanaan suasana kerja yang memadai.
- Mampu menerapkan prinsip memberi penghargaan maupun sanksi hokum yang sesuai dengan yang ada.

2. Tugas Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

- Menyusun program pengajaran.
- Menyusun dan menjabarkan kelender pendidikan.
- Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran.
- Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir.
- Menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan.
- Mengatur jadwal penerimaan rapor dan ijazah.
- Mengkoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan kelengkapan mengajar.
- Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.
- Mengatur coordinator mata pelajaran
- Melakukan supervise administrasi akademis
- Melakukan pengarsipan program kurikulum
- Penyusunan laporan secara berkala.

3. Tugas Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan

Membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dalam:

- Menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi: kepramukaan, PMR, UKS, PASSUS, pesantren kilat.
- Melakukan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan kesiswaan/OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurusan OSIS.

- Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi.
- Menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan incidental.
- membina dan melakukan koordinasi 9K.
- melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan penerima beasiswa.
- Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan diluar sekolah.
- Mengatur mutasi siswa.
- Menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru dan pelaksanaan MOS.
- Menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah.
- Menyelenggarakan cerdas cermat dan olahraga prestasi.
- Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala.

4. Tugas Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana dan Hubungan Masyarakat

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

- Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana.
- Mengkoordinasikan penggunaan sarana prasarana.
- Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran.
- Mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana.
- Bertanggungjawab terhadap kelengkapan data sekolah secara keseluruhan.
- Melaksanakan pembukuan sarana dan prasarana secara rutin.
- Menyusun laporan secara berkala.
- Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah.
- Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid.
- Membina pengembangan antara sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga social lainnya.
- Membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah.

- Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah.
- Menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah.
- Melakukan koordinasi dengan semua staf dan bertanggung jawab untuk mewujudkan.
- Menyusun program kegiatan bakti social, karya wisata, dan pameran hasil pendidikan.
- Mwakili Kepala Sekolah apabila berhalangan untuk menghadiri rapat masalah-masalah bersifat umum.

5. Tugas dan Fungsi Wali Kelas

Majelis guru membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dalam pengelolaan kelas meliputi:

- a) Tugas Pokok meliputi:
 - Mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan.
 - Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - Membantu pengembangan keterampilan anak didik.
 - Membantu pengembangan kecerdasan anak didik.
 - Mempertinggi budi pekerti dan kepribadian anak didik.
- b) Keadaan Anak Didik
 - Mengetahui jumlah anak didik.
 - Mengetahui jumlah anak didik putra (Pa)
 - Mengetahui jumlah anak didik putri (Pi)
 - Mengetahui nama-nama anka didik.
 - Mengetahui identitas lain dari anak-anak.
 - Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari.
 - Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik (tentang pelajaran, satus social/ekonomi, dan lain-lain).

- c) Melakukan Penilaian
 - Tingkah laku anak didik sehari-hari disekolah.
 - Kerajinan, ketekunan, dan kesantunan.
 - Kepribadian/ketertiban, dan lain-lain.
- d) Mengambil Tindakan Bila diperlukan
 - Pemberitahuan, pembinaan, dan pengarahan.
 - Peringatan secara lisan.
 - Peringatan khusus yang terkait dengan BP/Kepala Sekolah.
- e) Langkah Tidak Lanjut
 - Memperhatikan buku nilai rapor anak didik.
 - Memperhatikan keberhasilan/kenaikan anak didik.
 - Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak didik.
 - Memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan.

Majelis guru membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan administrasi kelas meliputi:

- a) Denah tempat duduk anak didik.
- b) Papan absensi anak didik.
- c) Daftar pelajaran.
- d) Daftar piket.
- e) Buku absensi.
- f) Tata tertib kelas.

Majelis guru membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dalam penyusunan dan pembuatan statistic bulanan anak didik meliputi:

- a) Pengisian daftar kehadiran peserta didik.
- b) Pembuatan catatan khusus tentang anak didik.

- c) Pencatatan mutasi anak didik.
- d) Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar.
- e) Pembagian buku laporan penilaian hasil belajar.

6. Tugas dan Fungsi Majelis Guru

Bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam melaksanakan, meliputi:

- Membuat kelengkapan mengajar (rincian minggu efektif, program tahunan, proram semester, pemetaan, KKM, silabus, RPP) secara baik dan lengkap.
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir.
- Melaksankan analisis hasil ulangan harian.
- Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan.
- Mengisi daftar nilai peserta didik.
- Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran.
- Membuat alat pelajaran/alat peraga.
- Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni.
- Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum.
- Melaksanakan tugas tertentu disekolah.
- Mengadakan pengembangan program pembelajaran.
- Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar peeserta didik.
- Mengisi dan meneliti daftar hasil sebelum memulai pelajaran.
- Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya.

D. Struktur Organisasi Tata Usaha (TU)

Selanjutnya adalah gambar struktur organisasi Tata Usaha (TU) adalah:

1. Tugas Kepala Tata Usaha

Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam:

- Mengkoordinasi semua kegiatan pelaksanaan administrasi mulai dari:
 - a) Persiapan.
 - b) Pelaksanaan.
 - c) Evaluasi.
- Menyusun program kerja tata usaha.
- Merencanakan kegiatan dan membagi tugas administrasi tata usaha.
- Menyiapkan form-form dan data sekolah.
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan administrasi.
- Memotivasi pelaksanaan kegiatan administrasi.
- Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan administrasi.
- Memberi laporan kepada kepala sekolah atas pelaksanaan administrasi.

2. Tugas Administrasi Keuangan/Bendaharawan

Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam:

- Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan dana atas pengetahuan kepala sekolah.
- Membuat laporan dan catatan khusus atas volume pengelolaan dana sesuai dengan aturan yang ada.
- Mengurus gaji/honor, transportasi guru, karyawan, rapel, kenaikan pangkat.
- Pengisian buku kas dan laporan keuangan/SPJ gaji, UUDP/uang lembur/DPP.
- Laporan kemajuan anggaran.
- Penyimpanan bukti pengeluaran uang no SPJ.
- Mengetik dan mendokumentasikan DP-3.
- Membuat Format F1 dan F3.
- Melaporkan SPT tahunan baik sekolah maupun guru dan karyawan.

3. Tugas Administrasi Kesiswaan

Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam:

- Mendata penerimaan peserta didik baru.
- Menyiapkan data siswa, jumlah siswa, jumlah tiap kelas, jumlah berdasar jenis kelamin.
- Pengisian buku induk siswa.
- Penyusunan/pengelompokan siswa berdasarkan abjad/kelas.
- Pembuatan data prestasi siswa yang meliputi: olahraga, seni, prestasi akademis dan lain-lain (akademis dan non-akademis).
- Mendata mutasi siswa (masuk/keluar).
- Rekap absensi siswa.
- Buku kumpulan nilai.
- Menyusun kumpulan foto copy ijazah/ DHUN/ transkrip/ sertifikat siswa dan tamatan yang lulus yang dikelompokkan sesuai dengan tahun pelajarannya.
- Pembuatan daftar hadir siswa.
- Pembuatan surat panggilan orang tua siswa, usulan siswa penerima beasiswa, surat keterangan pindah sekolah
- Mengantar/menjemput surat.
- Menangani pelaporan terpadu ke dinas pendidikan.
- Pemeliharaan brangkas.
- Membuat data statistik dan rekapitulasi siswa tiap bulan.

4. Tugas Administrasi Kurikulum

Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam:

- Pembuatan format dan pengetikan jadwal pelajaran, pembagian tugas guru dalam mengajar.
- Pembuatan SK pembagian tugas tambahan guru (SK Wakil, Wali Kelas, pustaka, dan piket)

- Pembuatan kalender pendidikan sekolah sesuai acuan dinas kota Pekanbaru/ dinas pendidikan provinsi Riau.
- Penyiapan ujian semester, ujian UAS, dan Ujian Nasional.
- Pengajuan datar nilai/leger yang meliputi: nilai raport, nilai US dan nilai ijazah.
- Pengisian/ rekap nilai US dan nilai ijazah.
- Pembuatan daftar hadir harian guru dalam mengajar, upacara senin, dan ceramah jum'at pagi.
- Pembuatan daftar hadir rapat guru, komite dll.
- Pembuatan rekom guru untuk melaksanakan tugas, izin mengajar dan izin belajar.
- Pembuatan datar piket harian siswa, keterangan izin masuk dan keluar siswa.

5. Tugas Administrasi Kepegawaian

Membuatn dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam pembuatan:

- File guru dan pegawai.
- Buku induk guru dan pegawai.
- Buku kendali (berisi data guru dan pegawai meliputi: kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat regular/ sistem kredit, kenaikan pangkatn prestasi, pembinaan karir (piagam, penataran, SK, dsb).
- Buku kemajuan guru dan pegawai.
- Buku cuti guru dan pegawai.
- Mengurus latihan pra jabatan dan sumpah pegawai negeri.
- Mengurus penataran guru.
- Menyiapkan/mengisi: uraian tugas guru dan pegawai.
- Buku SKP.
- Membuat daftar urutan kepangkatan (DUK) PNS.
- Rencana pengembangan SDM yaitu program sekolah yang dibuat oleh masing-masing urusan yang ada di sekolah yang tertuang dalam RAPBS.

- Analisis kebutuhan guru dan pegawai.
- Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kepegawaian dan tugas sekolah lainnya.
- Menyiapkan/mengisi: uraian tugas guru dan pegawai.
- Penyimpanan/mengelola/pengarsipan surat masuk/keluar.
- Mengagendakan surat masuk/keluar dan sekapitulasi jumlah surat masuk dan surat keluar.

6. Tugas Administrasi Kearsipan

Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam:

- Mengkonsultasikan surat kepada kaTU/Kapsek.
- Pengelolaan file surat, file guru dan karyawan.
- Pengelolaan buku-buku yang berkaitan dengan administrasi surat menyurat.
- Mengurus daftar hadir guru dan pegawai.
- Menyiapkan buku ekspedisi.
- Mengurus permintaan legalisasi ijazah.
- Pengarsipan ijazah/SKHU siswa baru, siswa tamatan dan siswa mutasi.
- Pengumpulan pas foto peserta Ujian Nasional.
- Pengumpulan data siswa baru dan siswa tamatan dan siswa mutasi.
- Membantu tugas lain yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah.
- Mendata semua sarana sekolah.
- Merencanakan pengadaan sarana.
- Mengadakan pengadaan sarana.
- Mengadakan perawatan sarana.
- Melaporkan keadaan sarana sekolah pada setiap semester.

7. Tugas Administrasi Sarana Prasarana

Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam:

- Membuat buku induk/inventaris barang.
- Membuat buku non inventaris.

- Membuat buku pemeliharaan.
- Membuat buku kendali/stok barang.
- Perencanaan/penyusunan kebutuhan barang.
- Pengelolaan inventaris: penerimaan barang, pembelian barang, penyimpanan barang, pendistribusian barang, pemeliharaan barang, penghapusan barang.
- Pengisian kuisioner sekolah.
- Pelayanan kebutuhan guru dan karyawan dalam pengambilan dan peminjaman inventaris/sarana sekolah.
- Membuat daftar/mengisis buku inventaris/sarana.
- Mengerjakan data inentaris barang peruang/kelas.

8. Tugas Administrasi Humas

Membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam:

- Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat.
- Urusan tamu dan kunjungan-kunjungan.
- Publikasi dan dokumentasi kegiatan (foto-foto).
- Menyiapkan minuman/makanan: untuk keperluan harian, tamu, dan untuk rapat sekolah.
- Melayani foto copy keperluan sekolah, guru dan siswa.
- Melayani pembelian alat-alat tulis siswa.

9. Tugas Penjaga Sekolah

- Melaksanakan/memelihara kebersihan gedung sekolah (kantor, kelas, labor, WC, dan gudang).
- Memelihara/mengelola sarana/prasarana kebersihan (sapu, keset, asbak, keranjang sampah, tong sampah).
- Merapikan tempat dan ruangan kerja kepek, guru dan TU.
- Menata perlengkapan dan keindahan tempat dan lingkungan kerja.
- Membersihkan dan memelihara/mengelola peralatan rumah tangga: peralatan makan/minum, dan perlengkapan lainnya.

- Peralatan pertukangan/perbaikan non inventaris/non keterampilan.
- Menyiapkan dan membenahi tempat untuk rapat-rapat.
- Mengontrol keadaan air dalam bak dan tengki air.
- Mengisi bak air, menyediakan lap tangan, sabun dan handuk kecil di toilet kepala sekolah dan guru.
- Mengunci pintu dan jendela setiap ruangan kantor, dan kelas.
- Menaikkan dan menurunkan bendera merah putih setiap hari, pagi dan sore setiap hari kerja.
- Penjaga sekolah wajib tinggal dilingkungan sekolah.

10. Tugas Petugas Kebersihan

- Melaksanakan kebersihan halaman depan dan belakang setiap kelas, kantor (guru, kepek, TU, labor, mushallah) kebun, dan tanaman sekolah.
- Melaksanakan/mengontrol kebersihan tempat wudhu, WC mushallah/siswa.
- Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah selama 24 jam.

11. Tugas Satpam

- Menjaga keamanan dan ketentraman setiap hari dari pencurian, pengrusakan, coret-coret, kebakaran, dan gangguan dari luar.
- Melaporkan kejadian/keadaan yang sifatnya merugikan sekolah kepada yang berwajib (Kepala Sekolah, Polisi)
- Melayani keluar masuk guru, siswa, orang tua/wali murid, tamu dan lain-lain melalui pintu gerbang setiap hari kerja.
- Mengatur ketertiban parkir sepeda motor siswa, guru/karyawan dan tamu.
- Melayani kegiatan ekstra kurikuler pada sore hari.
- Menegur/mendidik siswa yang melanggar ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.
- Melaporkan siswa yang melanggar aturan sekolah kepada bagian yang bertanggungjawab.

- Mengatasi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan sekolah SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru, SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru, SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru akan disajikan analisis pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian tentang evaluasi program penyaluran Kartu Indonesia Pintar dalam usaha meningkatkan pendidikan masyarakat kurang mampu. Data-data dianalisis diperoleh melalui wawancara yang diajukan pada informan.

A. Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Indonesia Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Bukit Raya, merupakan Program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang sengaja dirancang sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu siswa miskin dalam memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.

Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan menggunakan kartu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas/penanda penerima bantuan dana PIP, setiap siswa yang menerima bantuan PIP hanya berhak mendapatkan satu KIP yang bertujuan

untuk membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak.

Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program dari Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini berbentuk pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21) tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, keluarga yang memiliki Kartu Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim-piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah.

Program Kartu Indonesia Pintar menyediakan layanan berupa biaya transportasi, biaya perlengkapan sekolah dan uang saku bagi siswa. Untuk mengetahui dan menilai apakah program Kartu Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya tersebut telah terlaksana dengan baik, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaannya tersebut dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan penilaian terhadap pelaksanaan program.

a. Efektifitas Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Efektifitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Ditinjau dari segi pengertian efektifitas diatas, maka dapat di artikan bahwa efektifitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dalam perkembangan.

1. Tercapainya Target Atau Sasaran Dalam Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar

Tercapainya target atau sasaran adalah mendapatkan hasil yang terbaik dalam adanya mendapatkan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini untuk melaksanakan pembantuan oleh pemerintah untuk siswa yang kurang mampu di SMP Negeri dan SMP Swasta.

Berikut berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Muhammad Fachri S. Kom Operator PIP SMP di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengatakan:

“Dalam proses pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar ini semakin tahun semakin baik termasuk dalam sistem informasinya. Mengenai data yang di peroleh tiap tahun tentu berbeda tergantung siswa yang masih ingin mengurus KIP ini. Setiap usulan siswa berasal dari dapodik sekolah yang kemudian akan di verifikasi lagi oleh kemendikbud.” (Hasil wawancara, 18 Juni 2020)

Beikut berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibuk Eviwijriati S. Pd Wakil Kepala SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru mengatakan:

“Untuk progress dari target belum tercapai karena proses pengurusan Kartu Indonesia Pintar ini cukup rumit bagi siswa SMP seperti pengurusan ke RT/RW. Pelaksanaan.” (Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Di lanjutkan oleh Ibu Zulfirina S.Pd Wakil Kesiswaan SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Didalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar ini pencapaiannya masih besekitaran 70%. Mengenai sasaran untuk siswa yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak siswa yang seharusnya bisa mendapatkan bantuan dari Program Kartu Indonesia Pintar ini namun tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan program tersebut tidak bisa mendapat bantuan dari Kartu Indonesia Pintar. Untuk data siswa yang menerima program ini tergantung dari siswa itu sendiri, ingin mengurus atau tidak.” (Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kurikulum SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru Ibu Desmarita Susanti, S. Pd, yang memaparkan:

“Kalau secara nasional targetnya untuk sekolah kita kayaknya masih belum semua yang terakomodir. Artinya menurut saya hanya beberapa yang beruntung. Karena apakah kuota untuk SMP kita terbatas atau bagaimana, kalau target untuk penggunaannya jelas tercapai tetapi untuk secara masih kurang karena yang misalnya dana untuk siswa ada 20 orang tapi hanya setengah yang mendapatkan.” (Hasil wawancara, 28 Juli 2020)

Kemudian kepada Wakil Kesiswaan Ibu Syarifah Nurafidah, S.Pd, SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru mengatakan:

“Menurut saya belum tepat sasaran yang dimana siswa yang seharusnya membutuhkan dana bantuan dari program KIP ini justru tidak mendapatkan dan tidak terdaftar sebagai penerima program KIP tersebut, setau saya itu kan tergantung dinas yang mengeluarkan dana dan siapa saja yang mendapatkan. Kalau soal berbeda-beda setiap tahunnya yang mendapatkan KIP itu saya kurang tahu ya karena pihak sekolah hanya mendapatkan data yang diberikan kepada pihak sekolah, selanjutnya itu kan udah menjadi kewenangan dinas pendidikan. Jadi tibanya sekolah menyalurkan data saja.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

2. Tercapainya Tujuan Dalam Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar

Tercapainya tujuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sarana dari suatu program. Untuk itu dalam menjalankan suatu program maka dibutuhkan tujuan yang dapat menunjang berjalannya suatu program itu sendiri. Di SMP Negeri dan SMP Swasta dalam menjalankan program KIP diperlukan tujuan yang dapat mendukung jalannya pelaksanaan.

Hal ini senada berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Elly dan Ibu Wiwit selaku Orang Tua Wali Murid yang menggunakan KIP SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, mereka mengatakan:

“Menurut saya program KIP ini sudah cukup bagus terlebih lagi bisa membantu sedikit kebutuhan siswa, meskipun ada beberapa kendala seperti pengurusan persyaratan karena pihak sekolah hanya memberi informasi mengenai KIP ini selebihnya diurus oleh saya pribadi dan anak. Bantuan dari KIP ini masih belum cukup untuk kebutuhan anak saya namun saya sebagai orang tua sudah cukup bersyukur dari bantuan ini. Selain itu pengurusan syarat program ini cukup rumit dan menyita waktu yang lama.”
(Hasil wawancara, 23 Juni 2020)

Pada SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sri Rama Yanti, S. Si sebagai Kesiswaan mengungkapkan sebagai berikut:

“Yang jelas Program Kartu Indonesia Pintar ini programnya kan untuk membantu anak atau siswa yang kurang mampu, otomatis dengan adanya program ini sangat membantu sekali. Terlebih lagi juga memotivasi semangat mereka untuk belajar lebih giat lagi. Saya juga bingung mengenai masalah ini, karena program Kartu Indonesia Pintar ini murni dari dinas pendidikan saja. Mengenai data yang berbeda-beda itu dilihat dari data yang mana, sementara kita tidak pernah mengajukan tiba-tiba ada. Selain itu kelemahan dari KIP ini lambat dalam penyalurannya. Karena jika saat kelas

9 sudah lulus kemudian ia mendapatkan dana dari KIP namun karena sudah lulus ia tidak bisa lagi mengambil dana tersebut, jadi rugi. Jika demikian alangkah baiknya dana yang hangus itu diberikan kesempatan kepada siswa yang lain. Saya rasa itu wewenang dari dinas pendidikan sepenuhnya.” (Hasil wawancara, 28 Juli 2020)

Sedangkan Ibu Erni. M, S.Pd Wakil Kepala SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru, mengatakan:

“Menurut saya mengenai KIP ini belum cukup membantu anak-anak kurang mampu, karna dana yang didapatkan itu belum cukup membantu kebutuhan setiap siswa. Sedangkan berbicara mengenai target KIP ini kan program dari pusat ya, jadi kalau target sudah tercapai karena dana tersebut sampai kesiswa yang mendapatkan KIP tersebut” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Ada juga pendapat dari Bapak Ade Sutian S.Pd sebagai Wakil Kesiswaan SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru, mengatakan:

“Progressnya bagus sih cuman pemerataannya saja yang kurang. Karena masih ada beberapa anak seharusnya dapat tetapi belum dapat. Kalau untuk tercapainya otomatis pendataanlah. Pendataan yang dibutuhkan itu emang harus jelas, siapa yang betul-betul harus dibantu. Nah itu kita harus tau ya dari pendataan tadi.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Muklis S.Pd Wakil Kurikulum SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru, berikut petikannya:

“Ya seharusnya target yang dicapai itu pendataannya itu harus langsung sesuai dengan keadaan org tua/keadaan anak tersebut. Jadi ketika memberi bantuan itu bentuk dana bantuan itu pas kepada orang yang harus menerima. Jika mengenai sasarannya itu yang saya kurang mengerti, terkadang ada yang mohon maaf dalam finansial dia mampu atau lebih dia bisa dapat dana dari KIP itu, tapi ada juga yang benr-bener membutuhkan bisa tidak dapat dana dari KIP itu. Menurut saya sasarannya masih kurang efisienlah.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan hasil observasi yang dapat didapatkan melalui wawancara penulis dengan key informan dan informan dapat disimpulkan bahwa, kegiatan Program Indonesia Pintar ini masih belum mencapai target dari tujuan yang telah ditetapkan. Mengenai Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, hasil yang di harapkan belum sepenuhnya tercapai dikarenakan masih terdapat beberapa teknis pelaksanaan yang tidak berjalan dengan baik. Dapat diketahui bawah program KIP ini belum maksimal membantu pembiayaan pendidikan siswa yang kurang mampu.

b. Efisiensi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

1. Dalam Mencapai Hasil KIP Yang Telah Ditetapkan Dalam Program Kartu Indonesia Pintar

Berikut hasil wawancara kepada Ibu Erma Susilawati, S.Pd Kepala Seksi Kesiswaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Menurut saya dengan adanya program KIP ini bisa membantu masalah keadaan pendidikan seperti bantuan untuk siswa yang kurang mampu, memenuhi keperluan perlengkapan sekolah. Kalau kegunaannya seperti yang saya jelaskan tadi, tergantung

dari pihak siswa yang mendapatkan maupun pihak sekolah.” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2020)

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Ibu Eviwijriati S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Zulfirina, S.Pd selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Program KIP ini belum tercapai dan terpenuhi karena belum merata pelaksanaannya. Terkait dengan adanya program KIP ini digunakan sesuai keperluan siswa seperti pembelian buku dan alat tulis, pembelian baju dan perlengkapan (sepatu, tas, dll), transportasi, dan uang saku.” (Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Selanjutnya, hal ini senada peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Elly dan Ibu Wiwit Orang Tua Wali Murid SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, mengatakan:

“Menurut Ibu Elly dan Ibu Wiwit yang anaknya mendapatkan bantuan program KIP menjelaskan bahwasanya mendapatkan bantuan setiap persemester dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan sekolah anak.” (Hasil wawancara, 23 Juni 2020)

Wakil Kurikulum SMP Swasta YLPI Kota Peknabrau Ibu Desmarita Susanti, S.Pd memaparkan sebagai berikut :

“sangat membantu sekalilah dalam proses belajar anak disekolah, bagi siswa yang tidak mampu sehingga bisa menunjang kegiatan pembelajaran mereka disekolah.” (Hasil wawancara, 28 Juli 2020)

Ibu Erni. M, S.Pd Wakil Kepala SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru juga mengungkapkan adanya program Kartu Indonesia Pintar, sebagai berikut :

“Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya cukup membantu dalam memberikan dana bantuan kepada siswa yang kurang mampu.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Kemudian Wakil Kesiswaan SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru Ibu Syarifah Nurafidah, S.Pd memaparkan sebagai berikut :

“Kalau kegunaannya untuk siswa itu sendiri digunakan sebagai urusan administrasi disekolah, maksudnya jika dana itu cair pihak sekolah menyalurkan dana itu digunakan untuk pembayaran administrasi yang belum selesai, seperti uang baju, uang buku dll. Tapi itu tergantung siswa itu sendiri.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Ada juga pendapat dari Bapak Ade Sution Wakil Kesiswaan SMP dan Bapak Muklis S.Pd Wakil Kurikulum Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru. Mengatakan:

“Menurut saya program ini bagus ya, kalau bisa dikembangkan lagi supaya yang memang yang membutuhkan bisa mendapatkan dana bantuan itu.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Berdasarkan observasi penulis dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Key Informan dan Informan mengenai efisiensi program Kartu Indonesia Pintar ini dana untuk pembiayaan sekolah siswa dalam membeli keperluan sekolahnya, uang baju, uang transportasi dan uang saku. Dana yang diberikan belum mencukupi kebutuhan siswa itu sendiri. Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dapat terlihat jika sebagian dari dana tersebut digunakan untuk keperluan sekolah siswa.

Selain itu, pihak sekolah juga suda berupaya agar siswa yang pantas menerima bantuan dari Kartu Indonesia Pintar mendapatkannya tetapi belum optimal dikarenakan siswa yang tidak menerima Kartu Indonesia Pintar tidak secara maksimal berpartisipasi dalam mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Pihak sekolah yang membantu siswa dalam proses penyaluran dana dari Kartu Indonesia Pintar ini sendiri tidak mengetahui secara pasti bagaimana alur yang jelas dalam mendapatkan dana bantuan dari Kartu Indonesia Pintar.

c. Kecukupan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

1. Kecukupan Pemenuhan Dana Bagi Siswa Dalam Program Kartu Indonesia Pintar

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Ibu Erma Susilawati S.Pd Kepala Seksi Kesiswaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, mengenai indikator Kecukupan beliau mengatakan:

“Menuru saya, program ini belum cukup tepat karena masih terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaanya mulai dari data siswa yang ingin mengajukan KIP ini oleh operator sekolah yang tidak jelas dan belum lengkap hingga proses Verifikasi ” (Hasil wawancara, 18 Juni 2020)

Dilanjutkan oleh Wakil Kepala SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru Ibu Evijriwati S.Pd, beliau mengatakan:

“Untuk Program KIP ini belum cukup dalam pendaan maupun dana yang diberikan. Dana yang diberikan itu tidak cukup untuk digunakan siswa untuk memenuhi kebutuhan

sekolahnya, meskipun demikian program ini sudah membantu siswa.” (Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Wakil Kesiswaan Ibu Zulfirina S.Pd SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Dari yang saya lihat dana dari program KIP ini belum cukup ya untuk memenuhi kebutuhan siswa apalagi dalam pemenuhan kebutuhan sekolahnya. Untuk apakah KIP ini dapat memecahkan masalah menurut saya masih belum meskipun sedikit terbantu dengan adanya program KIP ini” (Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Dan berdasarkan hasil wawancara kepada Orang Tua Wali Murid SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, Ibu Wiwit. mengatakan:

“Dana yang diberikan pihak sekolah sebetulnya tidak terlalu cukup, mengingat banyaknya keperluan dan kebutuhan sekolah anak yang harus dipenuhi. Namun dengan adanya Program KIP ini sedikit membantu kami. Kalau untuk memotivasi anak dalam belajar sama saja” (Hasil wawancara, 23 Juni 2020)

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Rama Yanti, S.Si sebagai Kesiswaan SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru :

“Jika kita analisa untuk keuangannya tentu masih jauh lah yakan, Rp. 375.000 itu kalau rata-ratakan sebulan itu tidak mencukupi. Cukupnya itu untuk membeli ATK nya saja. Dan terkadang kita peruntukkan juga untuk pembayaran SPP nya dikarenakan Swasta kan ada uang SPP prbulannya, terkadang ya kalau mereka mau dialihkan ke SPPnya artinya tidak terpenuhilah.” (Hasil wawancara, 28 Juli 2020)

Berikut hasil wawancara kepada Ibu Desmarita Susanti, S.Pd Wakil Kurikulum SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Untuk biaya pendidikan ini tentu sangat belum cukup, seperti yang saya bilang tadi itu hanya bisa membeli ATK mereka saja untuk proses belajar mengajar seperti buku, tugas yang diprint, itupun hanya 50% bisa membantu.” (Hasil wawancara, 28 Juli 2020)

Kemudian Ibu Syarifah Nurhafidah, S.Pd Wakil Kesiswaan SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru, mengatakan :

“dilihat dari faktanya yang ada menurut saya dana tersebut masih kurang dalam membantu setiap siswa yang mendapatkan program KIP tersebut. Yang dimana setiap dana yang cair tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam pembayaran kewajiban siswa itu sendiri.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Wakil Kurikulum Bapak Muklis S.Pd SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru. Berikut tanggapannya :

“Kalau ditanya kebutuhan ya kurang cukup. Kalau khusus siswa yang sekolahnya SPP nya berbayar seperti kita swasta disini itu kurang dengan anggaran yang seharusnya. Kami kan dapatnya dana KIP itu Rp. 375.000/semester, otomatis itu kurang karena SPP nya saja udah Rp. 250.000/bulan. Jadi dana KIP itu kita bantu dia menjemput dana itu ke bank kemudian diarahkan untuk menyelesaikan urusan uang sekolahnya.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Ada juga pendapat dari Bapak Ade Sutian S.Pd Wakil Kesiswaan SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

“Belum memecahkan masalah sih sebetulnya secara masih banyak anak-anak yang membutuhkan.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Dari jawaban-jawaban informan yang penulis rangkum, maka dapat dilihat bahwa adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ataupun kendala dalam pelaksanaan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Upaya-upaya tersebut dilakukan bersama agar program KIP terlaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan dari indikator kecukupan terhadap Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar

dalam usaha meningkatkan Pendidikan masyarakat kurang mampu di kecamatan Bukit raya Kota Pekanbaru melihat dari kesempatan siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dapat terlihat masih belum mencukupi kebutuhan siswa dalam pemenuhan kebutuhan sekolahnya. Selain itu masih banyak siswa yang harusnya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar tetapi belum menerimanya jika dilihat usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk membantu siswa mendapatkan dana bantuan tersebut dikarenakan masih tidak meratanya program ini.

d. Perataan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik, kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan dan kewajiban.

1. Pemerataan Layanan Yang Diberikan Dalam Program Kartu Indonesia Pintar

Kemudian peneliti malakukan wawancara dengan Operator PIP SMP di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bapak Muhammad Fachri S.Kom, mengatakan bahwa:

“Menurut saya sebagai Operatur PIP di SMP layanan ini sudah disampaikan ketiap-tiap sekolah menengah pertama sehingga tentu saja informasi tersebut telah disampaikan pihak sekolah kepada siswa” (Hasil wawancara, 18 Juni 2020)

Wakil Kepala SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru Ibu Eviwijriati S.Pd, mengatakan sebagai berikut:

“Dalam memberikan informasi layanan program KIP ini sudah dilakukan ya, mengingat masih banyak siswa yang membutuhkan bantuan, tetapi belum merata. Tentu dengan adanya program KIP ini bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat yang kurang mampu dalam bidang pendidikan” (Hasil wawancara 22 Juni 2020)

Orang Tua Wali Murid SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru. Ibu Elly, mengungkapkan sebagai berikut:

“PIP ini menurut saya membantu sedikit dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat kurang mampu dan masih banyak juga anak-anak dan orang tua yang belum mengetahui tentang program KIP ini selain itu ada orangtua yang kurang mampu tapi tidak mendapatkan KIP ini” (Hasil wawancara, 23 Juni 2020)

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Rama Yanti, S.Si sebagai Kesiswaan SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru :

“Seperti yang saya bilang tadi serasa ada yang kurang maksimal, dari segi mana dilihatnya entah dari gaji orang tua atau gimana jadi kita juga gak tau target pemerintah entah seperti apa entah gaji/pekerjaan seperti pekerjaan orang tua yang freelance. Jadi memang untuk sasara nya disekolah ini masih sedikitlah. Masih sedikitlah yang terpenuhi, Karena kan harapannya untuk anak-anak yang kurang mampu ini seharusnya terpenuhilah. Jadi karena itu juga saya bingung dengan pemerintah KIP ini syarat detail ini. Belum tersosialisasikan atau belum tersampaikan.” (Hasil wawancara, 28 Juli 2020)

Bapak Muklis S.Pd selaku Wakil Kurikulum SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru mengenai perataan layanan yang diberik program KIP adalah sebagai berikut:

“Artinya kalau untuk pemerataan layanan tidak semua daerah. Masih banyak juga di beberapa daerah lain yang tidak tau menau soal dana KIP ini. Kalau untuk sekolah ini sendiri disosialisasikan kesekolah tidak ada ya. Cuma kita hanya mendata, ada tidak

anak-anak ini yang mempunyai kartu Indonesia pintar itu.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Berikut ini petikan dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Syarifah Nurafidah, S.Pd Wakil Kesiswaan mengatakan :

“Dari saya lihat masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan, tapi dalam meemenuhi kewajiban pendidikan itu yang kurang karena seperti yang kita lihat terkendala dibiaya. Sedangkan dana yang di dapat dari KIP belum cukup membantu kewajiban siswa itu sendiri.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

2. Keadilan Bantuan Dana Yang Diberikan Dalam Program Kartu Indonesia Pintar

Bantuan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program atau yang digunakan sebagai penunjang berjalannya suatu program tersebut. Dengan demikian maka dalam menjalankan program KIP di SMP Negeri dan Swasta di perlukan sejumlah dana yang dapat digunakan sebagai penunjang jalannya program ini.

Sedangkan hasil wawancara dengan ibu Zulfirina S.Pd selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Layanan yang diberikan dari PIP ini belum merata dan bantuan yang diberikan oleh pusat pun belum cukup adil karena dana yang diberikan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan siswa sehingga belum bisa memecahkan permasalahan masyarakat kurang mampu dalam bidang pendidikan” (Hasil wawancara 22 Juni 2020)

Wakil Kepala SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru Ibu Erni. M, S.Pd mengatakan bahwa :

“Belum merata ya, karena yang memilih siswa yang mendapatkan bantuan KIP tersebut yaitu dinas pendidikan itu sendiri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi banyak

siswa yang mendaftar tapi yang mendapatkan hanya setengah bahkan seperempat dari yang mendaftar.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Bapak Ade Sutian S.Pd selaku Wakil Kesiswaan SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

“Terbantu sih tetapi belum maksimal, karena biaya pendidikan itu kan mahal terlebih lagi swasta. Jadi pun kalau berharap dengan dana bantuan dari KIP itu ya tidak cukup” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemerataan dalam Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut belum bisa memecahkan persoalan-persoalan permasalahan pembiayaan untuk pendidikan.

Jadi hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan dari indikator pemerataan terhadap Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru melihat dari item indikator pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar dan keadilan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran program Kartu Indonesia Pintar, dana bantuan yang diberikan dari Kartu Indonesia Pintar ini belum merata mengingat masih banyak siswa yang membutuhkan bantuan karena dana yang diberikan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah siswa dan permasalahan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, informasi yang diberikan oleh Pihak Dinas Pendidikan selaku pengelola data siswa yang mendaftar dalam program Kartu Indonesia Pintar belum tersosialisasikan secara menyeluruh, hal ini dapat dilihat dari banyak sekolah yang

tidak mengetahui prosedur pendataan siswa yang termasuk dalam program Kartu Indonesia Pintar.

e. Responsivitas Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

1. Program Dapat Menyelesaikan Masalah Dalam Program Kartu Indonesia Pintar

Program dapat menyelesaikan masalah adalah bagaimana permasalahan anak putus sekolah atau anak yang tidak mampu untuk biaya sekolah. Adanya program KIP ini membantu anak-anak yang membutuhkan yang ada di SMP Negeri maupun SMP Swasta.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Seksi Kesiswaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ibu Erna Susilawati S.pd, beliau mengatakan:

“Menurut Saya program KIP ini dapat sedikit membantu memecahkan masalah bagi masyarakat kurang mampu. Untuk pemberian bantuan kepada siswa itu lebih kepada urusan pihak sekolah yang mengatasi karena tugas kami hanya memantau data-data anak mendaftar program KIP yang diberikan oleh pihak sekolah” (Hasil wawancara 18 Juni 2020)

Saat melakukan wawancara pada SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru dengan Ibu Zulfirina S.Pd sebagai Wakil Kesiswaan mengungkapkan sebagai berikut:

“untuk masyarakat kurang mampu program ini membantu ya, dalam artian dapat meringkankan beban orang tua dari dana bantuan yang diberikan” (Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Kemudian berdasarkan wawancara langsung dengan Orang Tua Wali Murid SMP Negri 22 Kota Pekanbaru, Ibu Wiwit mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang diberikan sudah cukup puas ya, membantu meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak dan pihak sekolah pun juga sudah memberikan arahan mengenai pengurusan KIP ini serta memberikan dana nya tepat waktu.” (Hasil wawancara, 23 Juni 2020)

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancarayang dilakukan penulis kepada key informan dan informan mengenai responsivitas dalam Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar dalam Usaha Meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah program ini dipandang sudah mampu meringankan beban siswa kurang mampu namun adanya harapan untuk kedepannya lebih baik lagi agar semua siswa miskin bisa merasakan manfaat Kartu Indonesia Pintar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar dalam Usaha Meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru cukup membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi dana yang diberikan belum terlalu cukup untuk keperluan sekolah siswa itu sendiri. Selain itu juga dapat sedikit membantu memecahkan masalah masyarakat yang kurang mampu.

f. Ketepatan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Ketepatan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketepatan merupakan actor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Ketepatan merupakan factor yang diperlukan seseorang untuk memberi arah kepada seseorang dengan maksud dan tujuan.

1. Adanya Manfaat Program Bagi Siswa Dalam Program Kartu Indonesia Pintar

Adanya manfaat program ini bagi siswa agar siswa lebih semangat bersekolah dengan nyaman tidak memikirkan biaya atau kebutuhan sekolahnya yang memerlukan biaya untuk membeli buku, transportasi, pakaian dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erma Susilawati S.Pd sebagai Kepala Seksi Kesiswaan SMP di Dinas Kota Pekanbaru, mengatakan:

“menurut saya target dari PIP itu sudah jelas, karena diperuntukkan siswa yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dibidang pendidikan” (Hasil wawancara, 18 Juni 2020)

Dan berikut hasil wawancara peneliti kepada Orang Tua Wali Murid SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru Ibu Elly, mengatakan bahwa:

“KIP ini sudah diberikan kepada orang yang tepat seperti saya contohnya yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak. Jika tidak diberikan per-semester juga akan menyusahkan kita karena untuk biaya tugas anak terkadang membutuhkan biaya yang banyak.” (Hasil wawancara, 23 Juni 2020)

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Wakil Kurikulum SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru Bapak Muklis S.Pd mengenai dana program KIP dengan ketentuan pemanfaatan dana, mengatakan bahwa :

“Kalau untuk pemanfaatannya sesuai, pas dengan yang di targetkan pemerintah tapi intinya sekali lagi besar dana yang kurang sehingga pemanfaatannya jadi tidak maksimal.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

2. Ketepatan Tujuan Program Dari Kartu Indonesia Pintar

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Target dari PIP ini belum tepat dikarenakan masih banyak siswa yang tidak mendapatkan KIP ini, meskipun KIP ini bisa membantu siswa dalam kebutuhan sekolahnya. Mengenai pemanfaatan dana itu tergantung masing-masing siswa dan orang tua nya.” (Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Dan kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Zulfirina S.Pd sebagai Wakil Kesiswaan sekolah SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, mengtakan bahwa:

“Belum mencapai target ya, karena masih banyak siswa yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan dari KIP ini, dan tentang pemanfaatan dana yang didapatkan oleh siswa saya rasa belum cukup.” (Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Kemudian hal ini senada dengan Ibu Syarifah Nurafidah, S.Pd Wakil Kesiswaan SMP 35 Kota Pekanbaru dan Ibu Rama Yanti S.Si Kesiswaan SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru mengatakan :

“Menurut saya cukup baik dimana pemanfaatan KIP ini sudah dimanfaatkan oleh siswa sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana. Dana KIP tersebut dapat digunakan siswa dalam membeli keperluan sekolahnya. Tapi untuk kami disekolah ini menyarankan agar dana diterima tersebut dapat digunakan siswa untuk membayar administrasi sekolahnya tapi itu tergantung siswa dalam pemanfaatannya karena kami pihak sekolah hanya menyarankan saja.” (Hasil wawancara, 28 Juli 2020)

Dan peneliti mewawancarai Bapak Ade Sutian S.Pd selaku Wakil Kesiswaan SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru tentang ketepatan target program KIP ini, mengatakan bahwa :

“Kalau untuk ketepatan, target untuk pembagiannya tepat Cuma ketepatan biaya jumlahnya lagi kalau bisa ditambah untuk biaya pendidikan. (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Berdasarkan observasi dari hasil wawancara dapat disimpulkan bawasanya ketepatan penyaluran proram kartu Indonesia pintar dalam usaha meningkatkan pendidikan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bukit Raya di Kota Pekanbaru tepat dalam pelaksanaan dan pemberian jumlah dan bantuan yang akan digunakan oleh siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya. Program ini dipandang sudah berjalan dengan baik dan diharapkan masalah-masalah yang timbul tentang tidak meratanya Kartu Indonesia Pintar bisa diatasi agar program ini bisa maksimal membantu seluruh siswa tidak mampu dalam pendidikan. Ketepatan target untuk siswa yang kurang mampu tidak sepenuhnya tepat sasaran masih ada juga siswa yang kurang mampu tidak mendapatkan KIP tersebut. Dan jumlah dana yang kurang sehingga pemanfaatan jadi tidak maksimal untuk pembiayaan pendidikan.

B. Hambatan Penyaluran Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya hambatan dalam Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan program Indonesia pintar sudah terlaksana tetapi belum mencapai target sesuai dengan tujuan program tersebut. Karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak petugas KIP mengenai kebijakan program Kartu Indonesia Pintar.

2. Masih belum jelas proses pendataan dalam menyeleksi siswa yang berhak menerima dana bantuan sehingga mengakibatkan banyaknya siswa yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan bantuan dari KIP.
3. Penilaian terhadap KIP masih belum baik karena peruntukannya tidak bagikan secara tepat sasaran oleh pemerintah. Sehingga banyak siswa yang mengeluhkn kenapa dirinya tidak mendapatkan KIP sementara mereka memenuhi kriteria.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan mengenai Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa adanya program Kartu Indonesia Pintar ini bertujuan untuk mengurangi anak yang berhenti sekolah dan untuk membantu siswa yang kurang mampu di sekolah baik yang ditingkat dasar maupun menengah. Dengan demikian, dengan ini anak sekolah memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik dan mencegah murid mengalami putus sekolah, serta mendorong anak yang putus sekolah kembali bersekolah. Selain itu, tujuannya adalah untuk memberi motivasi kepada siswa agar dapat meningkatkan prestasi pendidikannya di sekolah sehingga dapat menghilangkan kesenjangan. Program KIP ini juga mengurangi hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya dapat mencegah anak untuk berhenti sekolah, KIP juga membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran.

Dari hasil data dan wawancara peneliti dari enam indikator tersebut oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan SMP Negeri dan Swasta yang ada di Kecamatan Bukit Raya yang telah peneliti wawancarai, dapat diambil kesimpulan belum meratanya bahwa pelaksanaan program KIP pada SMP Negeri dan Swasta sudah terlaksana tetapi masih

butuh penambahan dan bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah agar cukup untuk memberi kebutuhan siswa dalam membayar kewajiban sekolahnya. Selain itu pemberian informasi mengenai KIP dan data siswa belum disosialisasikan sepenuhnya yang mengakibatkan kebingungan antara pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan program kartu Indonesia pintar ini, baik di SMP Negeri maupun Swasta.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini dalam Program Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu, saya selaku mahasiswa berharap agar program ini dapat terus di evaluasi agar lebih baik dari kedepannya dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dapat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.
2. Diharapkan agar petugas KIP yang ada di setiap sekolah lebih sering melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa penerima harus diinformasikan kesemua calon penerima, minimal satu kali persemester. Agar para siswa pemegang KIP bisa mengetahui mekanisme penyaluran dana KIP tersebut.
3. Diharapkan petugas KIP bisa melakukan pengawasan terkait penggunaan dana KIP. Agar tujuann dari penyaluran dana KIP tersebut bisa tepat sasaran.



4. Kepada pemerintah kebijakan ini baik dan tetap dilanjutkan, akan tetapi mempertimbangkan kembali dengan menambah jumlah dana yang diberikan kepada setiap peserta didik, supaya keperluan untuk pendidikan dapat terpenuhi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- AG, Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik edisi revisi*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, N. William. 2012. *Pengantar analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. PT. Gajah Mada University press.
- Hermino, D.A. 2018. *Guru Dalam Tantangan Globalisasi*. Malang: Ar-Ruzz Media.
- Ibahim, Amin. 2004. *Pokoko-pokok Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Kartenogoo, Putra. 1998. *Kepemimpinan dan Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Lobolo, M. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto dan Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalm Persektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha Talizinduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta; Rineka Cipta.
- _____. 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi*. Jakarta: PT. Elekmedia Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widarsama.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintah; Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Silalahi Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suharto, Edi. 2008. *Analisa Kebijakan Publik (panduan paktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial)*. Bandung: CV. Alfabeta

Sutopo dan Sugianto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bndung: Mander Maju.

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Tresiana, Duadji. 2011. *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model-model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pesindo.

Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yusuf, Farida. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta

Dokumentasi:

- Undang-Undanag Dasar 1945
- Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi
- Undang – Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pertunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.